



**ANALISIS KOMPARATIF RASIO FINANSIAL DITINJAU DARI
ATURAN DEPKOP DENGAN STANDAR AKUNTANSI INDONESIA
PADA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 1999
PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Diejukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administrasi Niaga
pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal	: Hordih	Klass
Terima Tgl:	09 NOV 2000	678.11
No. Induk :	10 233 05	MAR

Oleh :

Yusandy Nariska

NIM. E1D195 2245

Pembimbing :

Drs. Matnur Haryono
Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2000**

PENGESAHAN

Diterima oleh dan dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi Niaga

pada

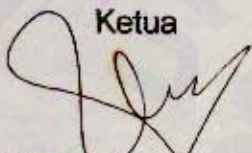
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Pada hari : Kamis

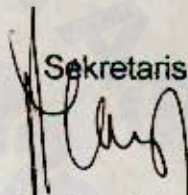
Tanggal : 26 Oktober 2000

Ketua



(Dra. Sulistyahingsih)
NIP: 130 802 221

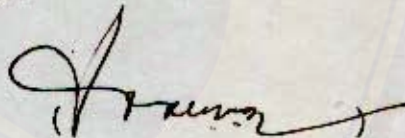
Sekretaris



(Drs. Matnur Haryono)
NIP: 130 531 992

Anggota Penguji :

Drs. Suroto Marmowiyono



Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dean

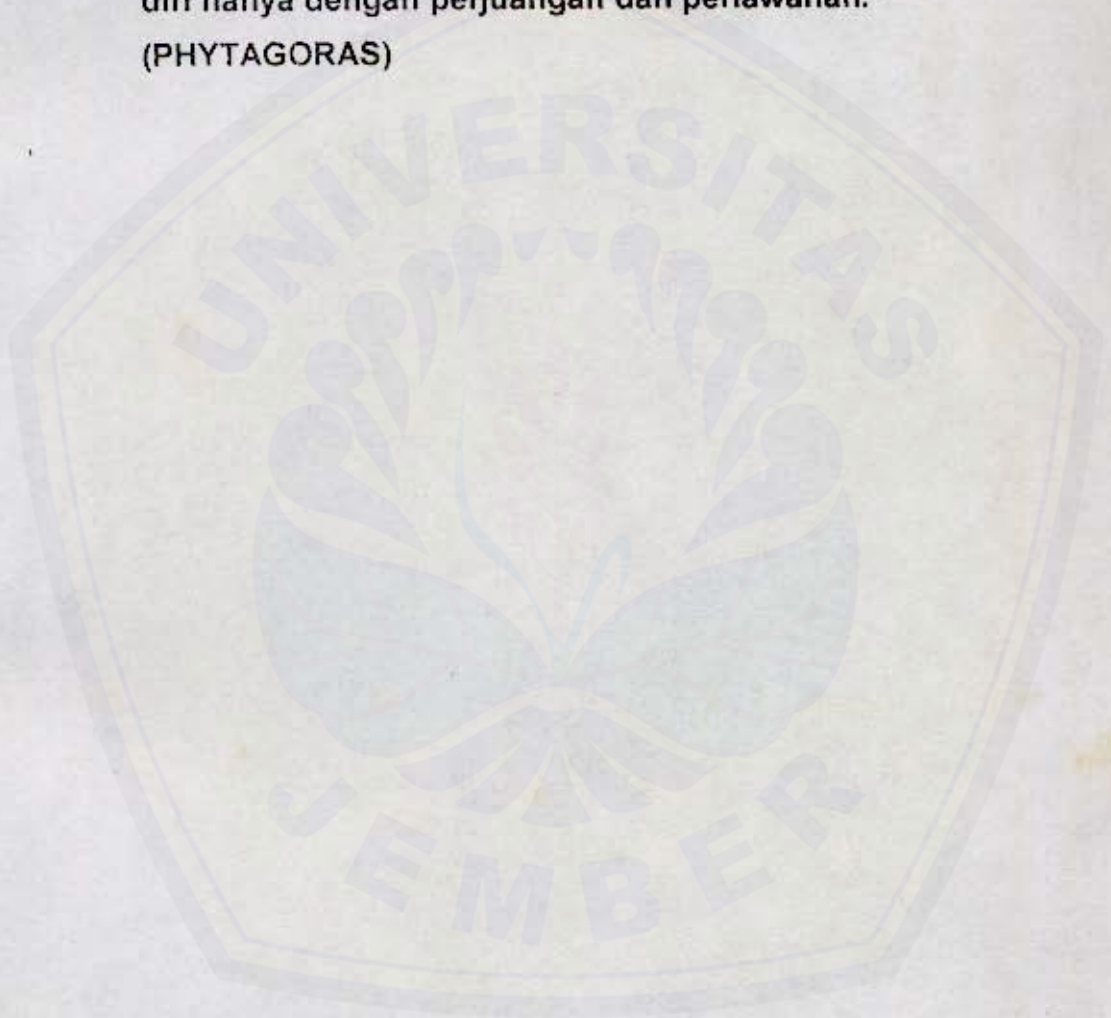


(Drs. H.M. Toerki)
NIP : 130 524 832

MOTTO :

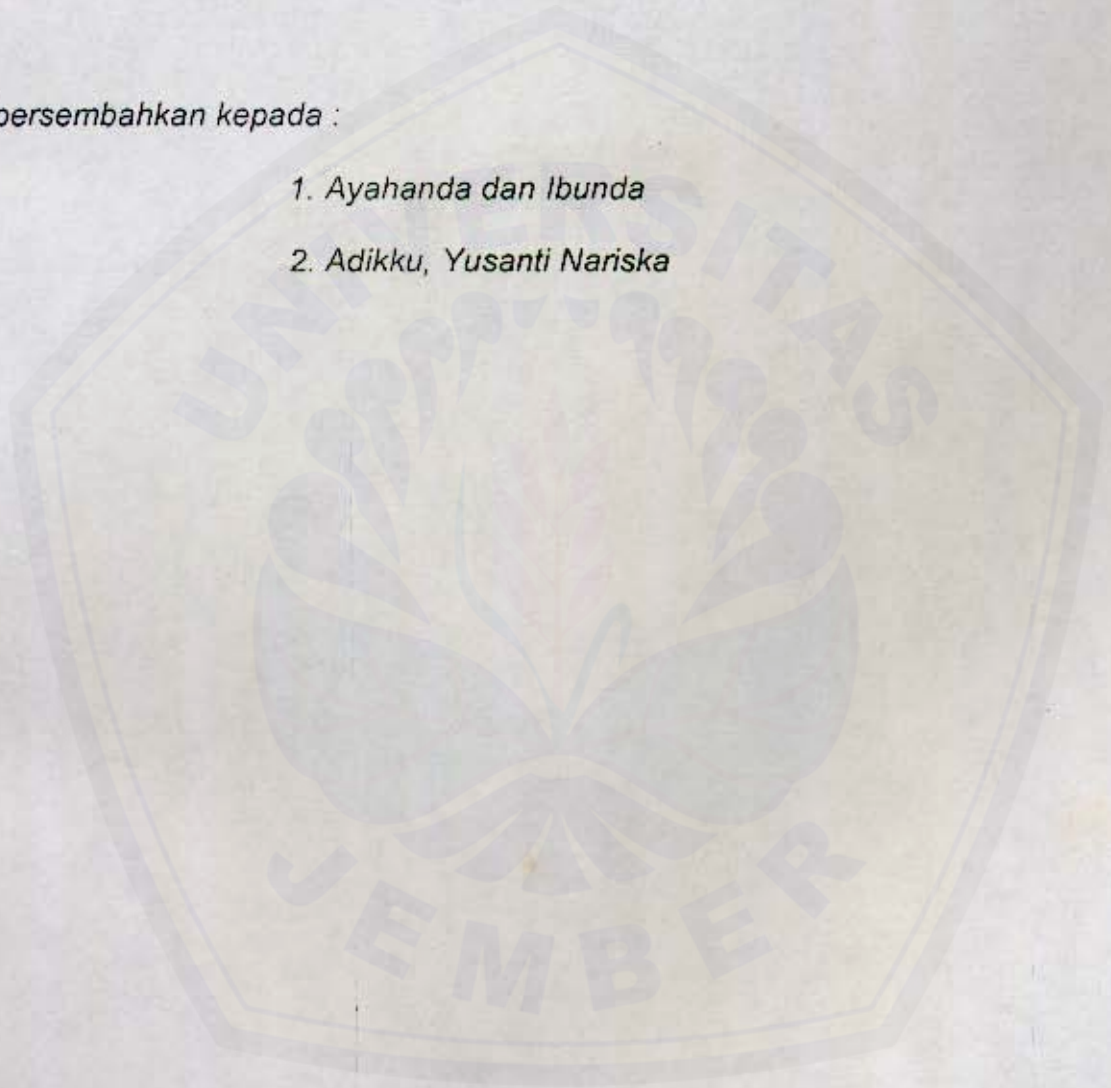
“Hanya dengan menentang anginlah layang-layang dapat naik, begitu pula manusia dapat menggerakkan diri hanya dengan perjuangan dan perlawanan.”

(PHYTAGORAS)



Dipersembahkan kepada :

- 1. Ayahanda dan Ibunda*
- 2. Adikku, Yusanti Nariska*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul "**Analisis Komparatif Rasio Finansial Ditinjau Dari Aturan Depkop Dengan Standar Akuntansi Indonesia Pada Laporan Keuangan Tahun 1999 Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Ngawi**" dapat terselesaikan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Niaga pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H.M.Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Bapak Drs. Agus Budihardjo, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Bapak Drs. Totok Supriyanto selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Niaga
4. Bapak Drs. Matnur Haryono selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Rudy Eko Prathomo, MSi selaku Dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberi ilmu kepada penulis.
7. Bapak Ir. Sudiro D.A. selaku Ketua II Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia beserta staff yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Sukidin sekeluarga atas dorongan semangat dan kebijaksanaannya.
9. Semua rekan Jurusan Ilmu Administrasi Niaga Angkatan '95. Terimakasih atas semua kenangan dan jalinan persaudaraan yang indah selama ini.

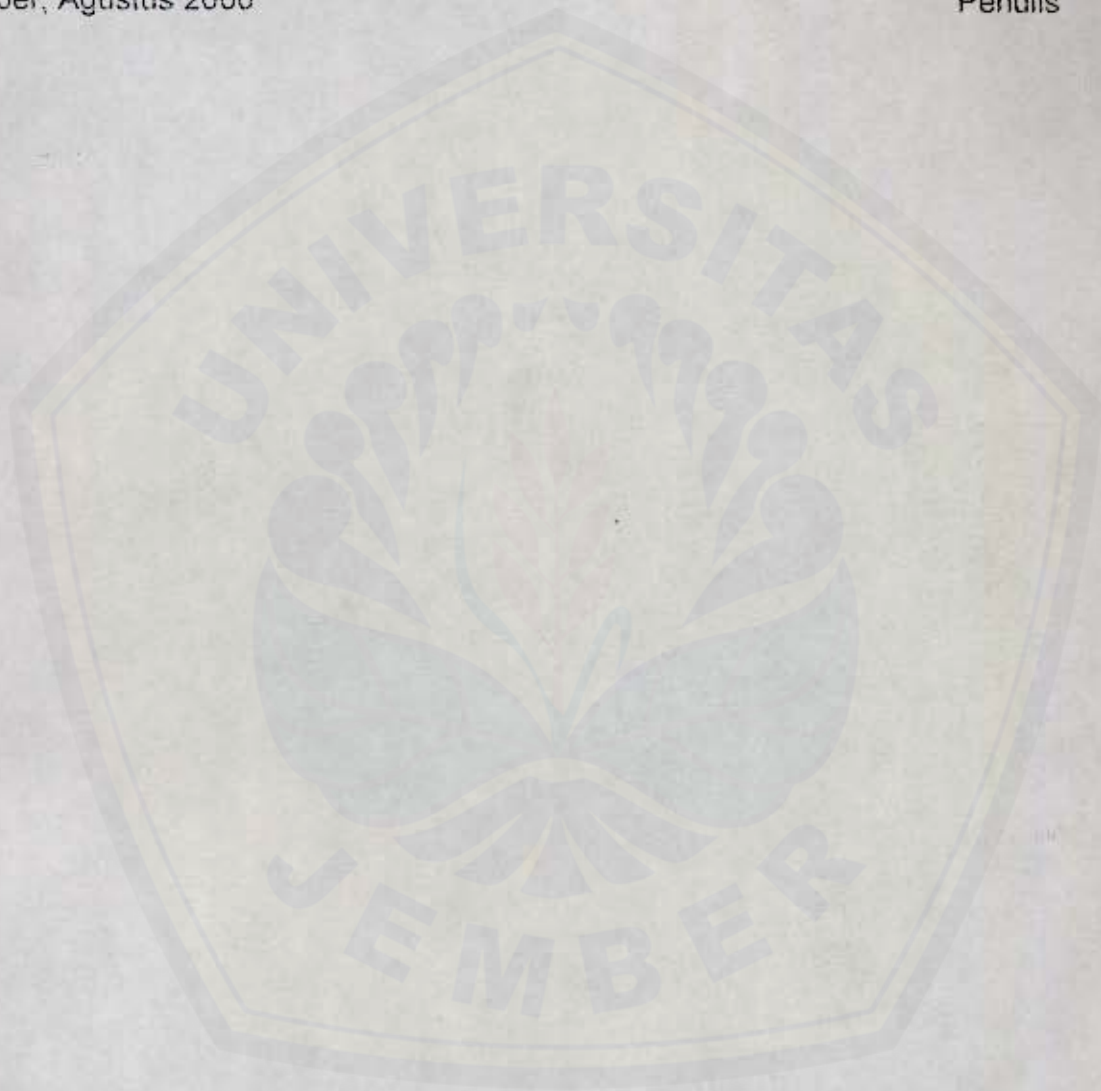
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan-kekurangan karena kemampuan penulis serba terbatas.

Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah banyak berjasa kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga memperoleh balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amien.

Jember, Agustus 2000

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Kegunaan Penelitian	5
1.4 Konsep Dasar Teori	5
1.4.1 Pengertian Koperasi	5
1.4.2 Keanggotaan	7
1.4.4 Permodalan Koperasi	9
1.4.5 Sisa Hasil Usaha	12
1.4.6 Koperasi Sebagai Badan Yang Memiliki Tanggung Jawab	13
1.4.7 Pengertian Akuntansi dan Laporan Keuangan	13
1.4.8 Bentuk Penyajian Laporan Keuangan	15
1.4.9 Analisis Laporan Keuangan	22
1.5 Asumsi	25
1.6 Operasionalisasi Konsep	25
1.7 Metode Penelitian	28

1.7.1 Tahap Persiapan	28
1.7.2 Tahap Pengumpulan Data	29
1.7.3 Tahap Analisis Data	29
1.7.4 Tahap Pengambilan Kesimpulan	30
II. GAMBARAN UMUM KOPERASI	31
2.1 Sejarah Singkat Koperasi	31
2.2 Lokasi Koperasi	32
2.3 Struktur Organisasi	33
2.3.1 Struktur Internal Organisasi	33
2.3.2 Struktur Eksternal Organisasi	36
2.4 Bidang Organisasi	36
2.3.1 Keputusan Rapat Anggota	36
2.3.2 Kepengurusan	37
2.5 Administrasi	41
2.4.1 Administrasi Organisasi	42
2.4.2 Administrasi Keuangan	42
2.6 Permodalan dan Usaha	42
2.5.1 Permodalan	42
2.5.2 Usaha	43
III. ANALISIS DATA	45
3.1 Analisis Rasio Menurut Kebijakan Depkop	45
3.1.1 Rasio Likuiditas	48
3.1.2 Rasio Solvabilitas	49
3.1.3 Rentabilitas	49
3.2 Analisis Rasio Menurut Standar Akuntansi Indonesia	50
3.2.1 Rasio Likuiditas	54
3.2.2 Rasio Solvabilitas	55
3.2.3 Rentabilitas	56

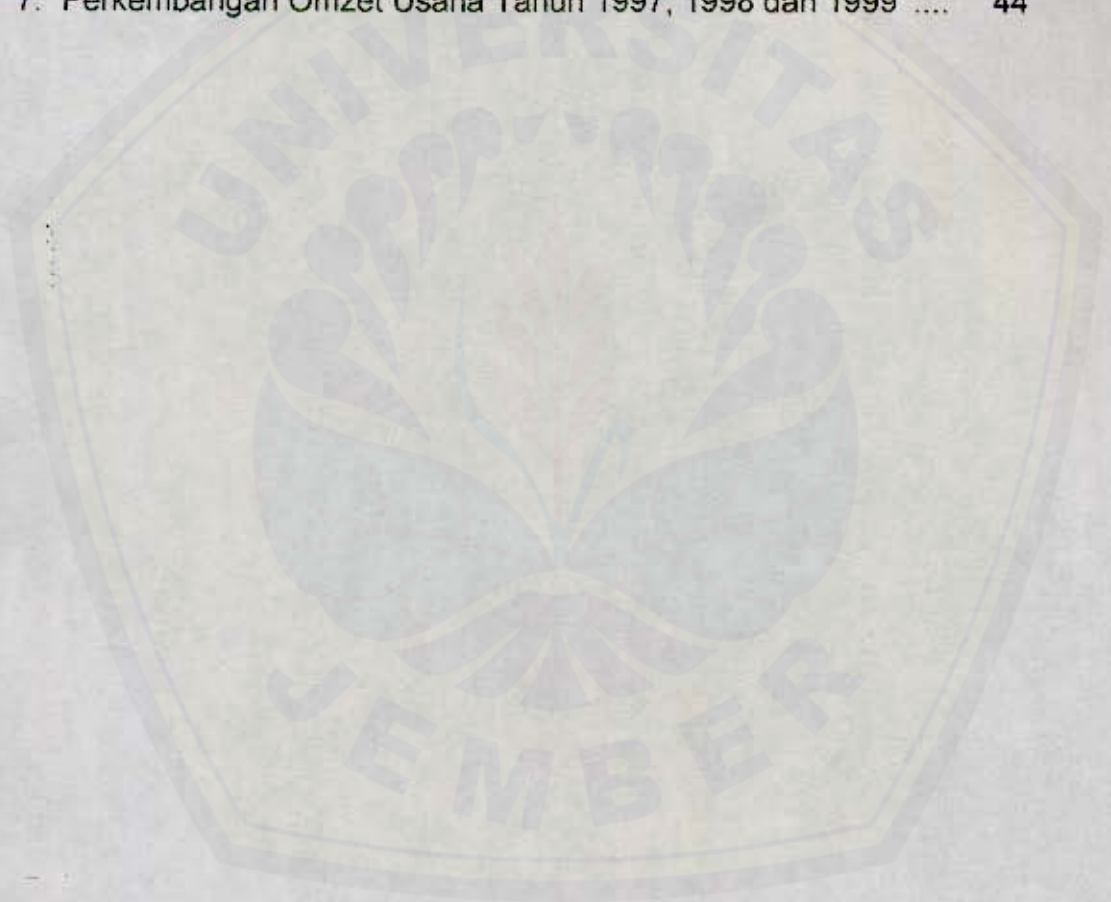
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA



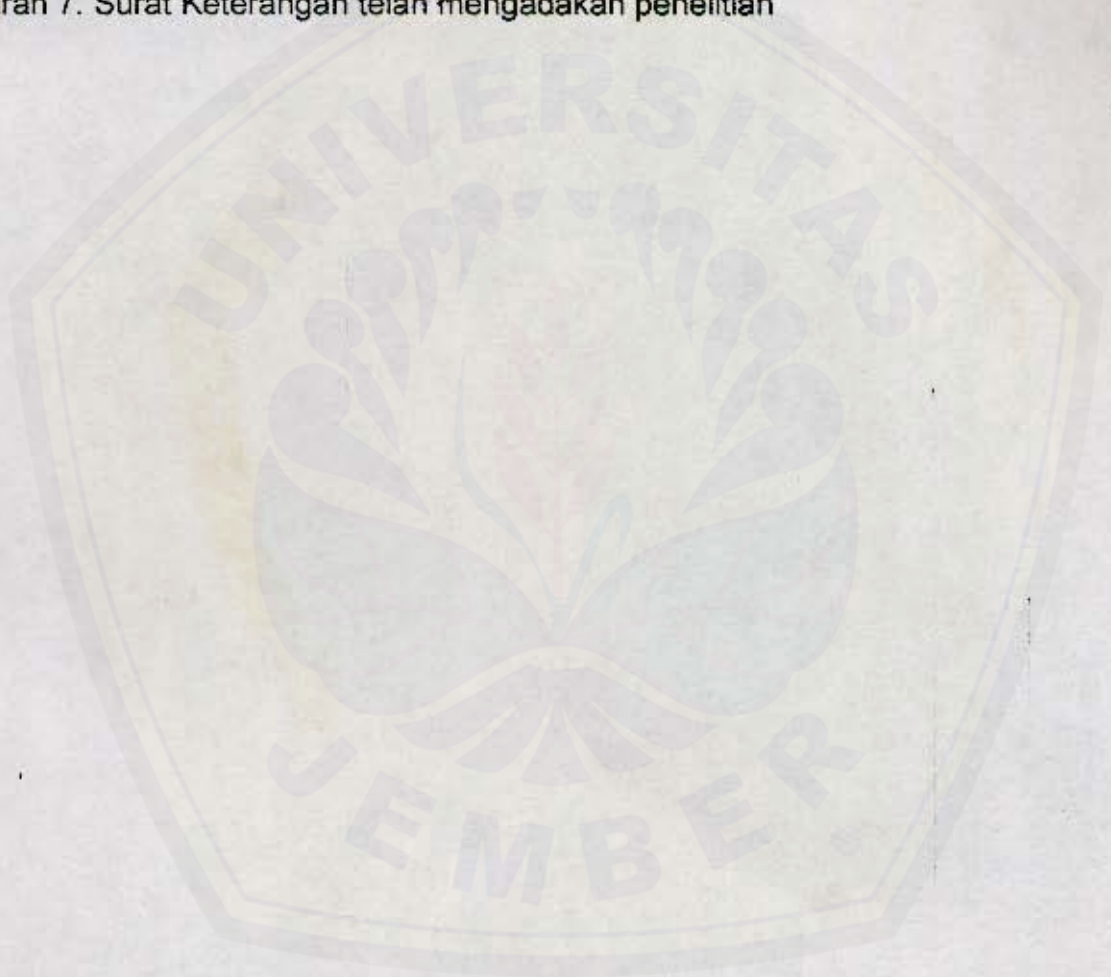
DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Susunan Pengurus PKP-RI Periode 1969 - 1999	37
Tabel 2. Susunan Pengawas PKP-RI Periode 1969 - 1999	38
Tabel 3. Jenis Rapat Yang Telah Dilaksanakan PKP-RI Tahun 1999	40
Tabel 4. Perkembangan Anggota Selama Tiga Tahun Terakhir	40
Tabel 5. Perkembangan Simpanan Anggota Tahun 1999	41
Tabel 6. Perkembangan Modal Sendiri Tahun 1997, 1998 dan 1999	43
Tabel 7. Perkembangan Omzet Usaha Tahun 1997, 1998 dan 1999	44



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Neraca PKP-RI Kabupaten Ngawi Tahun 1999
- Lampiran 2. Laporan Rugi-Laba PKP-RI Kabupaten Ngawi Tahun 1999
- Lampiran 3. Daftar Kekurangan Simp. Pokok dan Simp. Wajib Tahun 1999
- Lampiran 4. Perincian SHU PKP-RI Kabupaten Ngawi Tahun 1999
- Lampiran 5. Penjelasan Neraca PKP-RI Kabupaten Ngawi Tahun 1999
- Lampiran 6. Permohonan ijin melakukan penelitian
- Lampiran 7. Surat Keterangan telah mengadakan penelitian



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan koperasi di Indonesia harus ditingkatkan dan dikembangkan sebagai upaya dalam menggairahkan perekonomian Indonesia. Harapan dari pengembangan usaha ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja guna menampung angkatan kerja yang semakin meningkat.

Koperasi di berbagai negara, seperti halnya di Indonesia, telah diterima dan digunakan sebagai salah satu kegiatan dalam mencapai tujuan ekonomi. Hal ini dapat dilihat bahwa koperasi pada hakekatnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan, sehingga hal ini termasuk pada ruang lingkup ekonomi.

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha mempunyai peran serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi perlu lebih membangun dirinya agar menjadi kuat dan mandiri, sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional. Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya perhatian dari pemerintah dan seluruh rakyat dalam memberikan ide dan gagasan yang lebih baik untuk kemajuan koperasi.

Secara umum koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pada setiap akhir tahun pihak pengurus koperasi membuat laporan keuangan antara lain berupa Neraca dan Laporan Rugi-Laba, selain itu pihak pengawas juga melakukan analisis rasio finansial terhadap Neraca dan Laporan Rugi-Laba. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keadaan/posisi keuangan pada tahun tersebut, sehingga dengan berpegangan pada hasil tersebut pengawas dan pengurus mampu mengambil langkah-langkah bijaksana dalam pengambilan keputusan untuk masa mendatang.

Analisis rasio yang dilakukan meliputi ratio likuiditas yang berguna untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menjamin hutang-hutang jangka pendeknya; ratio solvabilitas yang bermanfaat untuk mengetahui kemampuan koperasi menjamin semua hutang-hutangnya apabila koperasi dilikuidasi dan besarnya rentabilitas untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba (SHU).

Hasil analisis rasio finansial, mempunyai manfaat penting, khususnya sebagai pegangan pengurus/pengawas dalam menetapkan kebijaksanaan di masa mendatang. Hasil analisis ini juga dirasakan manfaatnya oleh para anggota koperasi dalam rapat anggota yaitu dapat mengetahui keadaan keuangan yang sebenarnya, sehingga pembahasan dan pengesahan hasil rapat anggota mutunya dapat terus ditingkatkan. Selain itu dengan pelaporan posisi keuangan melalui analisis ratio tersebut dapat digunakan sebagai informasi bagi para calon anggota koperasi.

Penyusunan laporan keuangan dan analisis rasio sudah selayaknya dilakukan oleh koperasi-koperasi diseluruh Indonesia yang disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (Depkop P K dan M). Karya tulis ini bertujuan untuk memberikan acuan perbandingan mengenai penyusunan dan analisa ratio laporan keuangan yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Indonesia. Menurut Standar Akuntansi Indonesia neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan

modal/ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Selanjutnya dijelaskan bahwa ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagi. Sehubungan dengan penghimpunan ekuitas/modal anggota khususnya pada simpanan pokok dan simpanan wajib terkadang mengalami hambatan-hambatan, terutama disebabkan oleh beberapa anggota koperasi yang belum melakukan pembayaran. Untuk mengatasi permasalahan ini menurut Standar Akuntansi Indonesia simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib. Sedangkan menurut aturan Depkop yang berlaku pencatatan yang dilakukan langsung menyajikan jumlah yang ada pada simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum terkumpul secara penuh ataupun terkumpul penuh. Dari permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penyusunan dan perhitungan lebih lanjut terhadap laporan keuangan dan analisis ratio yang dilakukan dengan membandingkan antara aturan Depkop dengan Standar Akuntansi Indonesia sehingga dapat diketahui posisi keuangan koperasi tersebut.

Obyek penelitian berada di PKP-RI Kabupaten Ngawi, dikarenakan PKP-RI merupakan pusat dari KP-RI – KP-RI atau beranggotakan seluruh KP-RI Kabupaten Ngawi, sehingga PKP-RI menjadi acuan dan contoh bagi anggotanya (KP-RI) dalam penyelenggaraan kegiatan perkoperasian. Jadi apabila mutu dari PKP-RI membaik maka anggota-anggotanyapun ikut merasakan dan meniru dari peningkatan mutu tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Neraca sebagai bagian dari laporan keuangan, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada pemilik/anggota dan para kreditur. Neraca juga memberikan bahan penilaian mengenai likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.

Pembaca atau pengguna laporan keuangan pada koperasi antara lain terdiri dari anggota, calon anggota, kreditur dan pemerintah. Bagi anggota koperasi kegunaan dari informasi keuangan untuk memperlancar proses pertanggungjawaban pengurus/pengawas, sedangkan untuk calon anggota digunakan sebagai bahan pertimbangan mengenai keadaan keuangan koperasi yang akan dimasukinya. Para kreditur juga membutuhkan informasi keuangan ini sehubungan dengan kredit yang akan diajukan oleh koperasi yang bersangkutan, selain itu pihak pemerintah menggunakan informasi ini untuk mengetahui perkembangan koperasi tersebut. Pemahaman yang benar didalam cara menganalisis laporan keuangan, sesungguhnya harus diketahui dan dikuasai dalam hal ini para anggota koperasi, terutama pengurus dan badan pemeriksa, karena dengan demikian laporan keuangan yang setiap tahunnya diajukan kepada rapat anggota dapat dibahas dan disyahkan secara baik sehingga mutu koperasi dan keberhasilan koperasi akan berkembang dan dapat dirasakan bersama-sama.

Karya tulis ini membahas tentang bagaimana menafsirkan dan menganalisis laporan keuangan dengan membandingkan antara aturan yang ditentukan Depkop dengan Standar Akuntansi Indonesia sehingga mampu mengetahui posisi/keadaan keuangan koperasi. Dengan harapan dapat memberikan masukan kepada para anggota maupun pengurus koperasi yang perlu dibantu untuk memahaminya.

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yaitu adanya perbedaan dalam penyajian laporan keuangan pada neraca, khususnya mengenai pencatatan simpanan pokok dan wajib yang belum terhimpun secara penuh, maka dari hal tersebut perlu dilakukan perhitungan rasio finansial lebih lanjut agar memperoleh gambaran yang lebih baik terhadap keadaan keuangan PKP-RI Kabupaten Ngawi. Dari hal tersebut maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu : **“Apakah terdapat perbedaan Analisis Rasio Finansial Laporan Keuangan Tahun 1999 ditinjau dari aturan yang diberlakukan DEPKOP dengan Standar Akuntansi Indonesia?”**

1.3.2 Kegunaan Penelitian :

- a. Memberikan masukan kepada para anggota koperasi dalam menganalisis laporan keuangan, khususnya terhadap neraca, dengan harapan agar para anggota koperasi mampu menyumbangkan pemikiran/gagasan dalam kemajuan koperasinya.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengurus koperasi dalam menetapkan dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya agar koperasi dapat semakin berkembang.
- c. Sebagai pertimbangan bagi para calon anggota koperasi.

1.4 Konsep Dasar Teori

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan teori-teori yang merupakan rangkaian dari konsep yang mendasari pemikiran penulis guna mencapai jalan keluar dari persoalan yang diteliti.

Tujuan dari konsepsi dasar adalah untuk menyederhanakan pemikiran agar tidak terlalu meluas dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian. Dari uraian tersebut, ada beberapa konsep yang berhubungan dengan penulisan ini yaitu :

1.4.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi menurut Standar Akuntansi Keuangan No.27 (1999:1) adalah :

Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip - prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru erekonomian nasional.

Sedangkan menurut Mohammad Hatta (dalam Sukamdiyo, 1997:4) menyatakan bahwa : "Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong". Selanjutnya juga dikemukakan bahwa :

Gerakan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan tolong menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri-sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberikan jasa kepada kawan, berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.

Pengertian koperasi secara yuridis dapat dilihat pada UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992, Bab I, Pasal 1, Ayat 1, yang dimaksud koperasi adalah :

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dari pengertian-pengertian tersebut sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha, maka dapat dinyatakan tujuan koperasi adalah mencapai keuntungan (laba = Sisa Hasil Usaha). Keuntungan ini dirasakan sangat penting, demi kelangsungan dan perkembangan kegiatan usaha. Namun koperasi mempunyai watak sosial, jadi laba bukanlah tujuan yang utama. Sebagian dari laba tersebut dipakai untuk kepentingan sosial. Sebagai contoh, adanya SHU yang dibagi untuk biaya pendidikan maupun untuk sumbangan sosial. Hal ini merupakan keharusan dan merupakan realisasi dari sifat sosial koperasi.

Didalam UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992, Bab II, pasal 3 juga dinyatakan dengan jelas tujuan dari koperasi yaitu :

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Membahas mengenai kesejahteraan (sesuai dengan tujuan koperasi), menurut Nurzain dan Djohan (1986:20) kesejahteraan menurut keyakinan masyarakat koperasi adalah "keseimbangan dan keserasian antara kemajuan-kemajuan ekonomi dan terpeliharanya nilai-nilai sosial budaya yang menjunjung tinggi perikemanusiaan", kemudian lebih lanjut juga dijelaskan kesejahteraan dalam makna paripurna yaitu "kehidupan ekonomi yang berkecukupan dan rasa bahagia karena iklim kehidupan sosial budaya yang menunjang".

Untuk dapat mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Koperasi harus melaksanakan prinsip-prinsip yang telah ditentukan secara keseluruhan atau melaksanakannya sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Menurut UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, Bab II, Pasal 5, ayat 1 prinsip-prinsip perkoperasian adalah :

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan hal-hal pokok secara yuridis, sedang dalam perkembangannya dinyatakan juga mengenai pendidikan erkoperasian dan kerjasama antar koperasi, sehingga kualitas sumber daya manusia dan ikatan antar koperasi dapat ditingkatkan.

1.4.2 Keanggotaan

Salah satu prinsip koperasi adalah keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Pengertian lebih lanjut dari sifat keanggotaan ini, menurut Widiyanti dan Sunindhia (1998:108) adalah sebagai berikut :

- Sifat sukarela menegaskan bukan saja tidak boleh ada paksaan dari siapapun untuk menjadi anggota koperasi, tetapi juga perlunya kesadaran, keyakinan akan cita-cita luhur koperasi dan kebutuhan ekonomis tertentu.

- Sifat terbuka menegaskan didalam koperasi tidak diperbolehkan ada diskriminasi. Setiap warga negara dapat diterima menjadi anggota koperasi di lingkungannya atau yang sesuai dengan kepentingan ekonominya tanpa membedakan agama, suku bangsa maupun keyakinan politik yang syah yang dianutnya.

Lebih lanjut dijelaskan yang dapat menjadi anggota koperasi di dalam UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992, Bab V, pasal 18, ayat 1 disebutkan :

Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan-tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pembahasan ketentuan-ketentuan lebih lanjut untuk dapat menjadi anggota koperasi, dapat disimak didalam Widiyanti dan Sunindhia (1998:113), yaitu :

- a. Dewasa dan mampu melaksanakan tindakan hukum. Ini disebabkan oleh karena hanya orang-orang dewasa yang dapat mengikat perjanjian jual-beli dan memiliki hak menuntut di muka pengadilan.
- b. Menyetujui landasan idiil, asas dan sendi dasar koperasi.
- c. Sanggup dan bersedia memenuhi kewajibannya dan melakukan haknya sebagai anggota koperasi. Yang dimaksud kewajiban ialah
 - 1) Melunasi bagiannya masing-masing dalam simpanan anggota.
 - 2) Mentaati semua landasan, asas dan sendi dasar koperasi, Undang Undang perkoperasian, Anggaran dasar koperasi beserta aturan-aturan yang ditetapkan Rapat Anggota.

Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap koperasi, hal ini diatur didalam UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992, Bab V, pasal 20 sebagai berikut :

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban :
 - a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
 - c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan..

(2) Setiap anggota mempunyai hak :

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Penetapan kewajiban dan hak yang sama terhadap anggota, harus dijabarkan dengan semestinya, sehingga perasaan memperoleh keadilan mampu menumbuhkan sikap kesetiakawanan dan saling tolong menolong, oleh karena itulah koperasi dapat didirikan, dimodali, dibiayai, diatur serta dimanfaatkan oleh anggotanya sendiri.

1.4.3 Permodalan Koperasi

Permodalan koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Baik modal sendiri maupun modal pinjaman terdiri atas berbagai jenis sumber, yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Modal sendiri yang dikategorikan sebagai modal internal, menurut UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992, Bab VII, Pasal 41, ayat 2 terdiri dari :

- 1) simpanan pokok;
- 2) simpanan wajib;
- 3) dana cadangan;
- 4) hibah.

Untuk memahami susunan modal tersebut dapat diperjelas dengan keterangan sebagai berikut :

- **Simpanan pokok.** Sesuai dengan penjelasan UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992 adalah :

Sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- **Simpanan wajib.** Menurut penjelasan UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992 adalah :

Sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- **Dana cadangan.** Sesuai penjelasan UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992 adalah : "Sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila dibubarkan".

- **Hibah.** Menurut Sukamdiyo (1997:77), pengertian hibah yaitu : "modal yang diterima koperasi secara cuma-cuma dari pihak lain menjadi modal sendiri". Peristiwa ini biasanya banyak dijumpai di daerah-daerah misalnya hibah dari bapak lurah atau dari bapak pemuka masyarakat setempat.

b. Modal Pinjaman yang dapat dikategorikan kedalam modal eksternal, menurut UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992, Bab VII, pasal 41, ayat 3 berasal dari :

- 1) Anggota;
- 2) koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- 3) bank dan lembaga keuangan lainnya;
- 4) penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;
- 5) Sumber lain yang syah.

Untuk lebih memahami unsur-unsur pembentuk modal pinjaman tersebut lebih lanjut diterangkan dalam penjelasan UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992 sebagai berikut :

- Pinjaman dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
- Pinjaman dari koperasi lainnya dan/atau anggotannya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
- Pijaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penewaran secara umum.

Selain modal sendiri dan modal pinjaman koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Didalam penjelasan UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992 disebutkan lebih lanjut mengenai pemupukan modal sebagai berikut :

Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Pemupukan modal dari partisipasi baik pemerintah maupun masyarakat sangat diharapkan agar dana yang dihimpun semakin besar sehingga usaha yang dilakukan semakin berkembang demi kemajuan dan meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri.

Menurut Amidipradja dan Wirasasmita (1990:48), ditinjau dari usaha dan permodalannya, koperasi mempunyai empat macam golongan usaha yaitu :

- a. Koperasi yang membuat sesuatu barang, yang menghasilkan sesuatu atau yang memberikan jasa disebut dengan *koperasi produksi*.
- b. Koperasi yang membeli dan menjual hasil produksi atau barang dagangan, ialah *koperasi distribusi* atau istilah lain yang lebih umum yaitu *koperasi konsumsi*.
- c. Koperasi yang memberikan pinjaman kepada anggotanya, yaitu koperasi kredit atau koperasi *simpan pinjam*.
- d. Koperasi yang melakukan dua atau tiga macam usaha tersebut, biasa disebut dengan *koperasi serba usaha*.

Dari keempat macam golongan usaha ini PKP-RI kabupaten Ngawi termasuk dalam golongan koperasi serba usaha, karena selain sebagai koperasi konsumsi yang membeli dan menjual hasil produksi atau barang

dagangan, PKP-RI juga sebagai koperasi simpan pinjam yang memberikan pinjaman-pinjaman kepada anggotanya.

1.4.4 Sisa Hasil Usaha

Di dalam koperasi hal tersebut dapat dijelaskan dengan memperhatikan bunyi Undang Undang No. 25, Tahun 1992, tentang Perkoperasian, Bab IX, pasal 45, ayat (1), yang berbunyi :

Sisa Hasil Usaha Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan.

dan bila dihubungkan dengan pengertian laba secara umum menurut Needles dkk. (dalam Hadiwijaya dan Wirasasmita, 1989:3), terdapat keterangan sebagai berikut : "To the accountant, net income equals revenues minus expenses". Yang berarti bahwa Laba netto itu diartikan oleh para akuntan sebagai pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sisa hasil usaha adalah laba (keuntungan).

Sedangkan mengenai pembagian SHU, diatur dalam UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992, Bab IX, pasal 45, ayat 2 berikut ini :

Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Kemudian dalam Penjelasan UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992 dijelaskan lebih lanjut :

Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh rapat anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.

Untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut tentang pembagian Sisa Hasil Usaha, menurut Widiyanti dan Sunindhia (1998:155) adalah sebagai berikut :

- 25% untuk cadangan
- 30% untuk anggota sesuai dengan perbandingan jasa yang diberikannya.
- 20% untuk anggota penyimpan
- 10% untuk dana pengurus
- 5% untuk dana karyawan
- 5% untuk dana pendidikan koperasi
- 2,5% untuk dana sosial.
- 2,5% untuk dana pembangunan kerja

Mengenai pembagian prosentase di atas hanya merupakan pedoman pembagian SHU, sedangkan untuk penerapan lebih lanjut disesuaikan dengan kebijaksanaan koperasi melalui rapat anggotanya.

1.4.5 Koperasi Sebagai Badan Yang Memiliki Tanggung Jawab

Menurut Hadiwijaya dan Wirasasmitta (1989:3) maksud koperasi sebagai badan yang memiliki tanggung jawab adalah :

Pengurus/manajemen koperasi termasuk badan pemeriksanya bertanggung jawab kepada rapat anggota. Mereka bertanggung jawab mengenai kemajuan koperasi yang dikelolanya, baik dilihat dari kebijaksanaan atau cara kerjanya, maupun keberhasilan administrasi serta kebenaran catatan dan laporan keuangannya. Sedangkan para anggota badan pemeriksa, bertanggung jawab atas kewajaran hasil pemeriksaan mengenai jalannya usaha dan keuangan koperasi itu sendiri.

Dari penjelasan tersebut baik pengurus maupun pengawas harus senantiasa melakukan pencatatan dan bertanggungjawab atas hasil dari operasional koperasi. Untuk dapat membantu pengurus/manajemen dalam membuktikan tanggung jawabnya secara tertulis, perlu adanya data yang diolah secara memadai yaitu dengan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Demikian pula dengan badan pemeriksa, tidak sulit melaksanakan tugasnya dalam menganalisa laporan keuangan bila akuntansi koperasi dilaksanakan secara memadai.

1.4.6 Pengertian Akuntansi dan Laporan Keuangan

Menyinggung perihal akuntansi, menurut Hadiwijaya dan Wirasasmitta (1989:4) akuntansi adalah :

memproses seluruh data aktivitas perusahaan dalam suatu siklus akuntansi atau periode usaha, dikelompokkan dan diklasifikasikan

sampai menjadi laporan keuangan yang memuat informasi yang menyeluruh mengenai keadaan, sirkulasi, laba/rugi dan perubahan posisi keuangan serta laporan sisa hasil usaha.

Sedangkan menurut Munawir (1999:5) akuntansi adalah :

Seni daripada pencatatan, penggolongan dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan penunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul darinya.

Dari definisi tersebut diketahui bahwa peringkasan dalam hal ini dimaksudkan sebagai pelaporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan yang dapat diartikan sebagai laporan keuangan. Jadi laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan antara lain untuk mengetahui posisi keuangan serta hasil-hasil yang dicapai oleh badan usaha tersebut. Untuk lebih memahami pengertian laporan keuangan menurut Myer (dalam Munawir, 1995:5) bahwa yang dimaksud laporan keuangan adalah :

Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba ditahan).

Laporan keuangan sebagai pencatatan dan pelaporan peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan mempunyai beberapa keterbatasan. Dalam Wirasasmita dan Kenangasari (1990:9) keterbatasan dari laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Laporan keuangan itu pada dasarnya adalah interim report yang dibuat secara periodik dan merupakan laporan akhir. Semua jumlah atau hal yang dilaporkan di dalamnya tidak menunjukkan nilai likuidasi atau realisasi pada saat laporan dibuat. Dan pada laporan ini terbedung pendapat pribadi daripada manajemen yang bersangkutan.
- Laporan keuangan tidak menunjukkan nilai akhir dalam arti yang sebenarnya. Nilai yang dicantumkan pada daftar disesuaikan dengan peraturan konvensional daripada pembukuan yang dapat digunakan untuk bermacam-macam aktiva. Jadi nilai yang

tercantum adalah hasil kombinasi antara catatan, fakta, pertimbangan pribadi dan prinsip akuntansi.

- Laporan keuangan tidak mampu memberikan gambaran keuangan dan hasil usaha yang setepat-tepatnya karena terdapat beberapa faktor yang sukar ditentukan nilainya dalam satuan uang, sedangkan faktor ini mempunyai pengaruh pada kondisi termaksud.
- Laporan keuangan terdiri dari transaksi-transaksi keuangan pada saat yang berbeda dan kita ketahui bahwa nilai uang itu berbeda-beda.

Jadi selain terdapat kelebihan-kelebihannya, Laporan Keuangan juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang harus dipahami oleh pemakai laporan keuangan agar dalam pengambilan keputusan-keputusan yang didasarkan atas suatu laporan keuangan dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai hasil dan resiko yang akan terjadi.

1.4.7 Bentuk Penyajian Laporan Keuangan

Sebelum menganalisa dan menafsirkan suatu laporan keuangan, seorang penganalisa harus memahami bentuk-bentuk dan prinsip dari penyusunan laporan keuangan serta masalah-masalah yang mungkin timbul dari penyusunan laporan keuangan. Berikut akan membahas tentang **Neraca dan Laporan rugi-laba** yang merupakan salah satu bentuk dari laporan keuangan.

a. Pengertian Neraca.

Menurut Amidipraja dan Wirasasmita (1990:1), neraca adalah suatu daftar, baik yang disusun pada waktu berdirinya perusahaan/koperasi (Neraca pembukuan), atau yang disusun pada saat tertentu selama tahun pembukuan/periode pembukuan masih berjalan (Neraca bulanan atau Neraca antara), maupun yang disusun pada akhir tahun buku (Neraca tahunan, Neraca likuidasi), yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan bentuk perkiraan Scontro atau T Account ataupun Staffel/Report Form, dalam hal mana Harta atau Aktiva, Utang/Pasiva dan modal pada suatu saat tertentu/periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk uang/nilai uang.

Sedangkan menurut Munawir (1999:13), neraca adalah

Laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi neraca bertujuan untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu di mana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut dengan *balance sheet*.

Sebelum menelaah lebih jauh tentang neraca, maka perlu bagi kita untuk mengetahui fungsi daripada neraca. Menurut Wirasasmita dan Kenangasari (1990:3) fungsi neraca adalah :

- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan/koperasi sekaligus merupakan salah satu bagian bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada pemilik/anggota dan para kreditur.
- b. Neraca memberikan bahan penilaian mengenai likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas, serta aktivitas usaha.

Neraca terdiri dari tiga bagian utama yaitu aktiva, kewajiban/hutang dan modal/ekuitas. Tiga bagian tersebut diterangkan sebagai berikut:

1) Aktiva.

Menurut Wirasasmita dan Kenangasari (1990:12) aktiva adalah

Barang-barang atau benda-benda berharga dan hak-hak yang dimiliki sesuatu perusahaan/koperasi, misalnya : uang, tagihan-tagihan atau piutang-piutang, barang-barang dagangan/persediaan/inventory, tanah, gedung, mesin-mesin, kendaraan dan lain-lain

Pada dasarnya aktiva diklasifikasikan menjadi dua yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar/aktiva tetap. Penjelasan kedua klasifikasi aktiva ini, menurut Munawir (1999:14-16) adalah sebagai berikut

- (a) Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang diharapkan dapat dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal).

Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likwiditasnya, sehingga penyajiannya dimulai dari aktiva yang paling likwid sampai dengan aktiva yang paling tidak likwid. Yang termasuk di dalam aktiva lancar (likwid), antara lain : **Kas; Investasi jangka pendek;**

Pihutang wesel; Pihutang dagang; Persediaan (dalam usaha perdagangan) meliputi: (1) Persediaan barang mentah; (2) Persediaan barang dalam proses dan (3) Persediaan barang jadi; **Pihutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima; Persekot atau biaya yang dibayar di muka.**

(b)Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan).

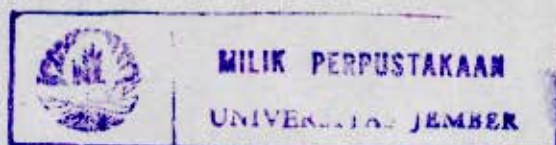
Yang termasuk dalam aktiva tidak lancar antara lain :

Investasi jangka panjang ini dapat berupa : (a) saham dari perusahaan lain, obligasi atau pinjaman kepada perusahaan lain; (b) aktiva tetap yang tidak ada hubungannya dengan usaha perusahaan ataupun (c) dalam bentuk dana-dana yang sudah mempunyai tujuan tertentu; **Aktiva tetap; Aktiva tetap tidak berwujud (*intangible fixed assets*); Beban yang ditangguhkan (*deffered charges*); Aktiva lain-lain.**

Penyajian aktiva diatas lebih cocok apabila diterapkan pada perusahaan-perusahaan sedangkan menurut SAS No.27 (1999:10) sebagai pedoman untuk penyajian neraca yaitu pada bagian aktiva terdiri dari :

- a. Aktiva Lancar antara lain terdiri dari : Kas dan Bank; Investasi Jangka Pendek; Piutang Usaha; Piutang Pinjaman Anggota; Piutang Pinjaman Non Anggota, Piutang Lain-lain; Penyusutan piutang tak tertagih; Persediaan; Pendapatan akan diterima.
- b. Investasi Jangka Panjang antara lain berupa : Penyertaan pada koperasi; Penyertaan pada non koperasi.
- c. Aktiva Tetap antara lain berupa : Tanah; Bangunan; Inventaris.
- d. Aktiva Lain-lain dapat berupa : Aktiva tetap dalam konstruksi; Beban ditangguhkan.

Bentuk-bentuk komponen diatas bersifat pedoman dasar agar penyajian pos-pos pada aktiva dan neraca pada umumnya dapat dipahami secara lazim dan layak sesuai standar akuntan Indonesia



2) Hutang

Pengertian hutang, di dalam Wirasasmita dan Kenangasari (1990:13) didefinisikan sebagai berikut : "Hutang adalah jumlah yang harus dibayar dan terdiri dari hutang/pinjaman, wesel bayar, hipotek, upah yang masih harus di bayar, pajak yang masih harus dibayar dan lain-lain." Sedangkan menurut Munawir (1990:13) pengertian dari hutang adalah "semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor."

Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan menjadi hutang lancar (hutang jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Menurut Munawir (1999:18-19) pengertiannya adalah sebagai berikut :

- (a) Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan.
- (b) Hutang Jangka Panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh tempo) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi :
 - (1). Hutang Obligasi,
 - (2). Hutang Hipotik adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
 - (3). Pinjaman Jangka Panjang yang lain.

Jadi didalam penggolongan hutang/kewajiban harus memperhitungkan kapan tanggal jatuh tempo pelunasan hutang, sehingga terdapat kejelasan informasi mengenai pembayaran hutang yang harus dilakukan terlebih dahulu.

3) Modal

Menurut Munawir (1999:19) pengertian modal adalah sebagai berikut :

Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

Sedangkan didalam Wirasasmita dan Kenangasari (1990:13) "Modal adalah kelebihan jumlah harta terhadap jumlah hutang dari perusahaan atau koperasi". Lebih lanjut disebutkan juga sumber-sumber modal perusahaan/koperasi yaitu :

- (a). dari para pemilik perusahaan/koperasi
- (b). dari laba bersih perusahaan atau SHU (dalamn koperasi)
- (c). cadangan yang merupakan penyisihan sebagian dari laba yang tidak dibagikan kepada yang berhak.

Dalam praktek kadang-kadang nampak adanya suatu klasifikasi di dalam neraca yang pada umumnya membingungkan pembaca (sulit ditafsirkan) dengan nama *reserve* (cadangan). Menurut Munawir (1999:20) seharusnya cadangan ini diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi *neraca* yaitu : aktiva, hutang dan milik sendiri (modal) sehingga cadangan pada prinsipnya juga terdiri dari tiga golongan yaitu:

- (a). Cadangan sebagai pengurang aktiva (*reserve that offseting assets*). Misalnya cadangan penyusutan (*reserve for depreciation*), cadangan ini merupakan pengurangan terhadap aktiva yang disusut, sehingga didalam neraca akan nampak pada sebelah debet mengurangi aktiva yang bersangkutan.
- (b). Cadangan sebagai hutang (*liability reserve*), misalnya *reserve for taxes* (cadangan untuk pajak) merupakan suatu hutang yang dicatat sebagai cadangan, ini tidak benar, seharusnya cadangan untuk pajak ini dimasukkan dalam hutang lancar (*current liability*), yaitu Hutang Pajak atau Taksiran Hutang Pajak.
- (c). Cadangan merupakan surplus, yang merupakan hak para pemilik perusahaan, misalnya "cadangan untuk ekspansi" adalah merupakan pemisahan sebagian sebagian dari laba yang ditahan (*retained earningng*), dan dalam neraca masuk dalam klasifikasi modal (*appropriated surplus*).

Pembedaan diatas apabila dicermati lebih lanjut merupakan pemahaman dan sifat kehati-hatian dalam penyusunan neraca yaitu berkaitan dengan klasifikasi dan penempatan pos-pos yang harus disesuaikan dengan klasifikasi yang terdapat pada aktiva, kewajiban dan modal/ekuitas.

Didalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27, 1999:4), modal/ekuitas terdiri koperasi dari :

Modal anggota berbentuk simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan SHU belum dibagi.

Selain itu hal lain yang perlu diperhatikan, lebih lanjut diterangkan : "simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib." Penjelasan ini perlu mendapat perhatian, karena sering terjadi di dalam pencatatan neraca, penyajian simpanan pokok dan simpanan wajib ditulis sesuai dengan jumlah yang terhimpun dari anggota padahal jumlah tersebut belum secara penuh terkumpul. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (1999) "penyajian nilai simpanan pokok dan simpanan wajib adalah dengan menyajikan nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib" sedangkan jumlah yang belum terhimpun disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.

Bentuk atau susunan neraca yang umum digunakan (traditionil atau conventionil) adalah sebagai berikut :

1).**Bentuk skontro** (*Account Form*) menurut Wirasasmita dan Kenangasari (1990:14) ialah "suatu bentuk penyusunan yang dibuat berhadap-hadapan dengan pemisahan yang satu seberlah kiri/debet dan seberlah kanan/kredit."

2).**Bentuk vertikal** (*Report Form*) menurut Amidipradja dan Wirasasmita (1990:3) ialah "suatu bentuk penyusunan yang dibuat menurun dari atas kebawah yaitu harta lebih dahulu disusun dan kemudian menyusul hutang dan modal tersusun kebawah."

Penyusunan bentuk-bentuk neraca didalam kenyataannya tidak ada keseragaman di antara perusahaan-perusahaan, penyusunan yang dilakukan tergantung pada tujuan-tujuan yang dicapai dengan disesuaikan

pada standar akuntansi Indonesia. Menurut Munawir (1999:21) menyatakan :

terdapat bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan perusahaan, bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi keuangan yang dikehendaki nampak dengan jelas, misalnya besar modal kerja netto (*Net Working Capital*) atau jumlah modal perusahaan.

b. Laporan Rugi-Laba

Di dalam Munawir (1999:26), Laporan Rugi-Laba merupakan "suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi/laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu." Dengan pencatatan ini pihak pengelola perusahaan/koperasi akan mampu melihat biaya/pengeluaran yang telah terjadi begitu pula dengan pendapatan yang telah diperoleh, sehingga akan dapat mengatur besar anggaran yang akan dialokasikan. Lebih lanjut menurut Wirasasmita dan Kenangasari (1990:32) dalam penyusunan laporan Rugi-Laba dapat diketahui :

- * 1). Diari mana datangnya keuntungan-keuntungan.
- 2). Pengeluaran-pengeluaran apa yang telah dilakukan dan pengeluaran-pengeluaran mana yang masih dapat dihemat."

Bentuk Laporan Rugi-Laba menurut Munawir (1999:26) adalah sebagai berikut :

- 1). Bentuk **single step**, yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, sehingga untuk menghitung rugi/laba bersih hanya memerlukan satu langkah yaitu mengurangi total biaya terhadap total penghasilan.
- 2). Bentuk **multiple step**. Dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan yang lebih teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum.

Seperti di dalam penyusunan neraca, bentuk dan susunan Laporan rugi-laba dapat disesuaikan atau tergantung dari tujuan-tujuan yang ingin

dicapai perusahaan, tetapi harus tetap memegang prinsip dalam standar akuntansi Indonesia

1.4.8 Analisa Laporan Keuangan

Analisa Laporan Keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan perhitungan ratio-ratio untuk menilai keadaan perusahaan di masa lalu, saat ini dan kemungkinannya di masa depan.

Data pokok sebagai input dalam analisa ratio ini Neraca dan Laporan Rugi-Laba. Dengan kedua laporan ini akan dapat ditentukan sejumlah ratio yang dapat dipergunakan untuk menilai posisi keuangan suatu perusahaan/koperasi. Berikut diutarakan ratio-ratio finansial yang berhubungan dalam penelitian ini :

a. Likwiditas

Yang di maksud dengan likwiditas adalah kemampuan koperasi dalam membayar utang-utang jangka pendeknya tepat pada waktunya. Untuk menghitung likwiditas dapat digunakan ratio - ratio sebagai berikut :

$$1) \text{ Current ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

(Riyanto, 1995:266)

$$2) \text{ Cash ratio} = \frac{\text{Kas + Efek}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

(Riyanto, 1995:266)

$$3) \text{ Quick ratio} = \frac{\text{Aktiva likwid - Persediaan}}{\text{Hutang jangka pendek}} \times 100\%$$

(Syamsudin, 1995:45)

4) Working capital to Total Asset Ratio

$$= \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}}{\text{Jumlah Aktiva}} \times 100\%$$

(Riyanto, 1995:267)

Tidak ada suatu ketentuan yang mutlak tentang berapa tingkat ratio yang dianggap baik atau yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan karena biasanya tingkat ratio ini juga sangat tergantung pada

jenis usaha dari masing-masing perusahaan. Akan tetapi sebagai pedoman umum, Menurut Syamsudin (1995:44) Quick ratio sebesar 1,00 atau 100 % sudah dapat dianggap baik (*considered acceptable*).

b.Solvabilitas

Yang dimaksud dengan solvabilitas ialah kemampuan perusahaan/koperasi untuk membayar semua kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga dengan harta bendanya, bila perusahaan/koperasi tersebut dilikuidasi.

1) Total Debt to Equity Ratio =

$$\frac{\text{Hutang Lancar} + \text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Jumlah Modal Sendiri}} \times 100\%$$

(Wirasasmita dan Kenangasari, 1990:39)

2) Total Debt to Total Capital Assets =

$$\frac{\text{Hutang Lancar} + \text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Jumlah Aktiva}} \times 100\%$$

(Wirasasmita dan Kenangasari, 1990:39)

3) Long Term Debt to Equity Capital =

$$\frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

(Wirasasmita dan Kenangasari, 1990:39)

4) Tangible Assets Debt Coverage =

$$\frac{\text{Jumlah Aktiva} - \text{Intangibles} - \text{Hutang Lancar}}{\text{Hutang jangka panjang}} \times 100\%$$

(Wirasasmita dan Kenangasari, 1990:40)

5) Time Interest Earned Ratio =

$$\frac{\text{Earning Before Interest and Tax (EBIT)}}{\text{Bunga Hutang Jangka Panjang}} \times 100\%$$

(Wirasasmita dan Kenangasari, 1990:40)

c. Rentabilitas

Rentabilitas dihitung dalam persen dan merupakan perbandingan antara keuntungan dan modal. Jadi besar kecilnya rentabilitas dipengaruhi oleh keuntungan dan modal. Terdapat tiga macam cara penghitungan rentabilitas yaitu :

a. Rentabilitas Badan Usaha

Dalam hal ini yang harus dicari ialah besarnya modal sendiri, dan berapa besarnya laba bersih. Jadi rumusnya ialah :

$$\text{Rentabilitas Badan Usaha} = \frac{\text{Untung Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

(Amidipradja dan Wirasasmita, 1990:117)

b. Rentabilitas Ekonomis.

Di dalam suatu usaha kadang-kadang dibutuhkan modal dari luar, baik dari bank koperasi maupun dari bank pemerintah. Modal sendiri dan modal luar bersama-sama menghasilkan suatu keuntungan. Tetapi untuk modal luar tersebut harus dibayar dengan bunga sebagai balas jasa. Oleh karena itu untuk perhitungan Rentabilitas Ekonomis labanya terdiri dari sisa hasil usaha ditambah bunga bank, rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rentabilitas Ekonomis} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha} + \text{Bunga Bank}}{\text{Modal Sendiri} + \text{Modal Luar}} \times 100\%$$

(Amidipradja dan Wirasasmita, 1990:118)

Dalam perhitungan rentabilitas ekonomis harus mempergunakan juga daftar rugi/laba, dimana dapat dibaca laba bersih (sisa hasil usaha) dan bunga yang dibayarkan.

c. Rentabilitas Perusahaan.

Banyak koperasi yang ikut melakukan usaha dengan koperasi hanya dengan menyertakan modalnya saja. Sebagai contoh yaitu menyertakan modal pada Bank Koperasi, baik berupa simpanan pokok maupun simpanan wajib, dengan suatu harapan memperoleh keuntungan yang diberikan oleh bank koperasi.

Penyertaan ini diambil dari modal sendiri. Keuntungan yang didapat dari Bank Koperasi bukanlah jerih payah sendiri. Maka untuk perhitungan rentabilitas ini yang diambil sebagai modal ialah (Modal luar + Modal Sendiri) - Penyertaan. Dan sebagai laba ialah (Saldo SHU + Bunga Modal Luar) - Laba Penyertaan. Sehingga diperoleh rumus sebagai berikut :

$$\text{Rentabilitas Perush.} = \frac{(\text{SHU} + \text{Bunga Bank}) - \text{Laba Penyertaan}}{(\text{Modal Sendiri} + \text{Modal Luar}) - \text{Penyertaan}} \times 100\%$$

(Amidipradja dan Wirasasmita, 1990:119)

1.5 Asumsi

- a. Penilaian hanya dilakukan pada Neraca akhir Tahun 1999.
- b. Posisi keuangan yang dimaksud didalam penulisan ini adalah :
 - 1). Kemampuan koperasi/perusahaan dalam membayar hutang-hutang lancar tepat pada waktunya.
 - 2). Kemampuan dalam membayar semua hutang-hutang, apabila koperasi/perusahaan dilikuidasi.
 - 3). Tingkat prosentase keuntungan atau rentabilitas koperasi.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Dari beberapa konsep yang telah dikemukakan, maka perlu dioperasionalkan lebih lanjut sehubungan dengan tujuan yang ditetapkan agar mempermudah dalam proses analisis dalam penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan.

Didalam karya tulis ini dilakukan komparasi analisis rasio antara kebijaksanaan Depkop dengan Standar Akuntansi Indonesia, hal ini dimaksudkan memberikan masukan-masukan terhadap kebijaksanaan yang dijalankan berdasarkan Standar akuntansi Indonesia, sehingga dapat mengetahui perbedaan maupun kekurangan-kekurangan yang ada, agar wawasan dalam melakukan analisis rasio dapat semakin luas demi kemajuan dan meningkatnya mutu koperasi. Pengambilan analisa ratio laporan keuangan sesuai kebijaksanaan Depkop diambil dari Laporan

Pertanggungjawaban Pengawas PKP-RI Kab. Ngawi Tahun 1999 yang kemudian dikomparasikan dengan Standar Akuntansi Indonesia. Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan menyusun terlebih dahulu laporan keuangan berdasarkan kedua kebijaksanaan untuk selanjutnya dengan mengacu pada masing-masing susunan laporan keuangan dihitung besar rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rentabilitas. Jenis dan rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis Ratio	Menurut peraturan Depkop	Menurut Standar Akuntansi Indonesia
Likwiditas	Current Ratio = $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$	Curent Ratio = $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$
	Quick Ratio = $\frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$	Quick Ratio = $\frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$
	Cash Ratio = $\frac{\text{Kas} + \text{bank}}{\text{Hutang Lancar}}$	Cash Ratio = $\frac{\text{Kas} + \text{bank}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$
Solvabilitas	Total Debt to Equity Ratio = $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Jumlah Hutang}}$	Total Debt to Equity Ratio = $\frac{\text{Hut. Lancar} + \text{Hut. Jk. Panjang}}{\text{Jumlah Modal Sendiri}} \times 100\%$
	Total Debt to Total Asset Ratio = $\frac{\text{Jumlah Aktiva}}{\text{Jumlah Hutang}}$	Total Debt to Total Asset Ratio = $\frac{\text{Hut. Lancar} + \text{Hut. Jk. Panjang}}{\text{Jumlah Aktiva}} \times 100\%$
	Rentabilitas Badan Usaha = $\frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$	Rentabilitas Badan Usaha = $\frac{\text{SHUbersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus diatas akan didapat besar rasio dari masing-masing kebijaksanaan. Dari besar rasio yang diperoleh akan dievaluasi dengan ukuran rasio standar atau besar rasio yang dianggap baik/yang harus dipertahankan oleh koperasi. Menurut Syamsuddin (1995:44) menyebutkan "bahwa tingkat rasio sangat tergantung pada jenis usaha masing-masing perusahaan". Maka dengan mengacu dari pernyataan tersebut sebagai pedoman umum ukuran akan diambil dari karya tulis atau buku-buku yang berhubungan dengan perkoperasian. Sebagai pedoman umum tentang standar tingkat rasio dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tingkat Rasio Likuiditas

Sesuai dengan pedoman yang disesuaikan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pengawas Tahun 1999 PKP-RI Kab. Ngawi dapat diterangkan sebagai berikut :

- 1) Current Ratio mempunyai standar normal sebesar 2,5.
- 2) Quick Ratio mempunyai standar normal sebesar 1,00.
- 3) Cash Ratio mempunyai standar normal sebesar 0,71.

b. Tingkat Rasio Solvabilitas

Sesuai yang tercantum didalam Laporan Pertanggungjawaban Pengawas Tahun 1999 PKP-RI Kab. Ngawi, besar rasio yang dianggap baik yaitu 1,00.

c. Tingkat Rentabilitas

Menurut Soetardjo (1989:68) disebutkan bahwa besar rentabilitas 3,02 sudah dianggap baik/dapat dipertahankan oleh koperasi yang bersangkutan.

1.7 Metode Penelitian

Metode dalam arti sesungguhnya adalah cara atau jalan. Dalam hubungannya dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja dalam memahami konsep yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Jadi sesuai tujuan penelitian, yaitu menemukan, mengembangkan, serta mengakui kebenarannya. Maka usaha yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode ilmiah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.7.1 Tahap Persiapan

a. Menentukan lokasi penelitian.

Penelitian dilakukan di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Dati II Ngawi. Dipilihnya PKP-RI sebagai obyek penelitian, karena PKP-RI merupakan pusat dari seluruh KP-RI di kabupaten Ngawi. Sehingga turut menjaga mutu PKP-RI dengan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat berarti juga memperhatikan anggota-anggotanya (KP-RI) dan diharapkan kemajuan-kemajuan selalu dicapai oleh koperasi yang bersangkutan.

b. Observasi pendahuluan

Mempunyai maksud untuk mengetahui dan melihat aktivitas perusahaan/koperasi dengan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya sehingga dapat diketahui fenomena yang terdapat pada koperasi yang diteliti.

c. Menetapkan permasalahan

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis dapat mengkaji fenomena yang terjadi sehingga dapat ditentukan permasalahan yang akan dikaji.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk menambah teori-teori dalam menentukan konsep yang mendasari penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan referensi yang ada kaitannya dengan permasalahan pada obyek penelitian.

1.7.2 Tahap Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode :

a. Observasi

Yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara sistematis terhadap aktivitas perusahaan.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak pemimpin dan atau karyawan perusahaan untuk mendapatkan data ataupun keterangan yang lebih obyektif.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari laporan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Studi Literature

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca literature yang berhubungan dengan obyek penelitian dan data-data historis yang berasal dari laporan perusahaan.

1.7.3 Tahap Analisis Data

Menurut Munawir (1999:36) terdapat dua metode analisa yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu analisa horisontal dan analisa vertikal.

a. Analisis Horisontal atau Analisa Dinamis adalah analisa dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya.

b. Analisis Vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya

dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu juga.

Penulis menggunakan analisa vertikal, karena hanya menganalisa data pada satu periode saja. Sedangkan alat-alat analisa yang dipakai, yaitu :

- 1). Analisa Ratio Likwiditas.
- 2). Analisa Ratio Solvabilitas.
- 3). Analisa Rentabilitas.

1.7.4 Tahap Pengambilan Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan, terdapat dua cara penarikan kesimpulan, antara lain :

a. Metode Induksi

Yaitu suatu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

b. Metode Deduksi

Yaitu suatu metode yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang sifatnya umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.

Penulis menggunakan metode deduksi, karena penulis berpedoman pada teori yang ada serta disesuaikan dengan obyek penelitian.

II. GAMBARAN UMUM KOPERASI

2.1 Sejarah Singkat Koperasi

Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Ngawi dibentuk pada tanggal 27 Desember 1961 dengan pendirinya :

- a. J.A.S Martowardojo, Wakil Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Negeri Pusaka.
- b. R. Hadi Kasirin, Wakil Kopersi Simpan Pinjam Pegawai Negeri Pemda Tingkat II Ngawi.
- b. R. Abimanjoe, Wakil Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Negeri Kantor Kabupaten Ngawi.
- c. Ngalimin, Wakil Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Negeri Kependjaraan Ngawi.
- d. Soejono, Wakil Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Negeri Sedjahtera.

Pusat Koperasi Pegawai Negeri ini diakui berdirinya sebagai badan hukum pada tanggal 6 Pebruari 1962 dengan nomor : 707/BH/II. Sebagai pengurus permulaan pada waktu itu adalah :

Ketua I	: J.A.S. Martowardojo
Ketua II	: Koentjojo
Penulis I	: R. Abimanjoe
Penulis II	: Soewarsono
Bendahara I	: R. Hadikasirin
Bendahara II	: Ngalimin
Pembantu Umum	: Soejono

Akte pendirian Pusat Koperasi Pegawai Negeri ini mengalami beberapa kali perubahan. Yang terakhir tercatat dengan nomor : 707B/BH/III/12-'67 dengan tanggal 3 Maret 1984. Kemudian disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN) diubah namanya menjadi Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) dengan badan hukum nomor : 707C/BH/III/12-'67 tertanggal 22 Nopember 1995.

2.2 Lokasi Koperasi

PKP-RI Kabupaten Ngawi terletak di jalan Trunojoyo 80c Ngawi. Penentuan letak pusat pelayanan koperasi ini dilatar belakangi oleh beberapa aspek penting, antara lain aspek ekonomi, aspek psikologi dan aspek sosial.

Terhadap aspek yang pertama, yaitu aspek ekonomi, apabila dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan yang bersifat *profit oriented*, seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Firma dan perusahaan non koperasi lainnya. Bagi perusahaan-perusahaan ini masalah penentuan lokasi perusahaan merupakan masalah strategis dalam rangka mengoptimalkan laba.

Demikian pula halnya dengan koperasi, sebab pada dasarnya koperasi adalah sebuah perusahaan, walaupun orientasinya bukan kepada laba, tetapi bukan berarti koperasi anti kepada perolehan laba. Laba dalam pelaksanaan usaha koperasi hanya sebagai akibat dan bukan sebagai tujuan. Tujuan koperasi adalah memberikan pelayanan dan terciptanya keuntungan/laba atau yang disebut dengan sisa hasil usaha, digunakan sebagai pendukung pengembangan koperasi.

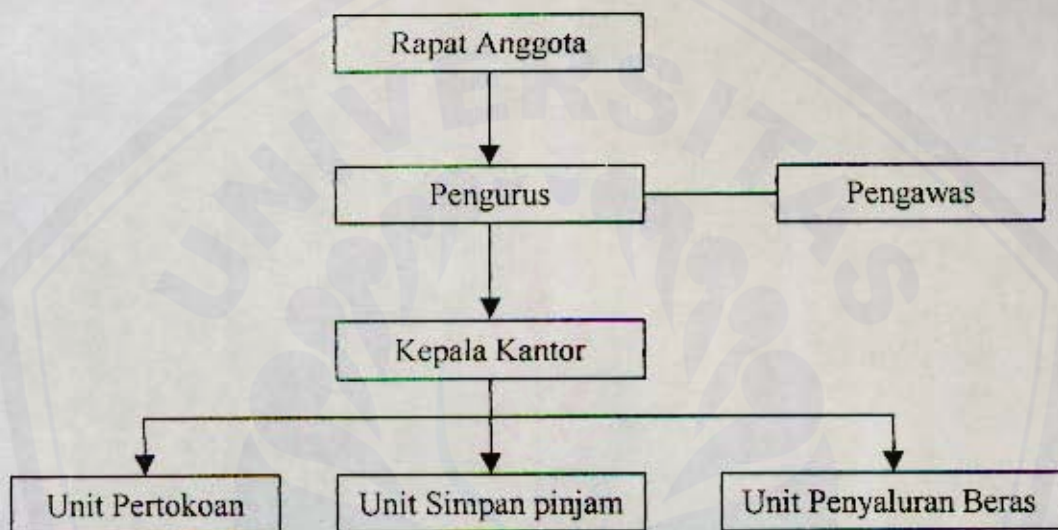
Pada PKP-RI Kabupaten Ngawi, salah satu keuntungan yang diperoleh dengan adanya penentuan lokasi yang tepat, adalah tersedianya tenaga listrik yang cukup dan sarana transportasi yang baik. Hal ini dikarenakan letak pusat pelayanannya berada di wilayah perkotaan. Dengan tenaga listrik yang cukup maka diharapkan akan dapat membantu dalam pelaksanaan operasional sehari-hari, seperti sebagai sumber energi untuk alat-alat elektronik yang mendukung dalam kegiatan administrasi, sebagai sumber energi penerangan dan lain sebagainya.

Melalui sarana transportasi yang tersedia dapat menguntungkan bagi anggota/non anggota yang menginginkan membeli suatu produk dari koperasi tersebut, selain itu juga memudahkan dalam pengelolaan koperasi sehari-hari.

Apabila ditinjau dari aspek psikologi dan sosial, koperasi sebagai suatu wadah yang digunakan untuk saling bekerjasama dalam peningkatan kesejahteraan anggotanya, maka diharapkan mampu menciptakan kemudahan hubungan diantara para anggotanya serta adanya rasa kebersamaan dalam mengembangkan ide-ide.

2.3 Struktur Organisasi

2.3.1 Struktur Internal Organisasi



Bentuk susunan organisasi tersebut merupakan pencerminan tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian sehingga akan tercipta suatu *team work* yang kompak, serta akan tercapai tujuan yang efektif dan efisien dari yang telah ditetapkan.

Adapun pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian dalam organisasi adalah sebagai berikut :

a. Rapat Anggota

Adalah alat kelengkapan organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan dan program kerja yang harus dilaksanakan pengurus/pengawas PKP-RI Kabupaten Ngawi. Tugas dari rapat anggota ini adalah menetapkan :

- Anggaran dasar.

- Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan tata usaha.
- Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- Pembagian sisa hasil usaha.
- Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

b. Pengurus

Adalah orang-orang yang dipilih dan diangkat oleh rapat anggota untuk memangku jabatan kepengurusan dalam menangani organisasi dan usaha kerja PKP-RI dalam jangka waktu tertentu.

Adapun tugas dari pengurus ini adalah :

- Memimpin organisasi dan usaha koperasi.
- Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakilinya dihadapan dan di luar pengadilan.
- Menyusun pembagian kerja/tugas diantara pengurus secara tertulis.
- Bertanggungjawab kepada rapat anggota.
- Menyelenggarakan pembinaan terhadap anggota guna meningkatkan kemampuan usahanya; memimpin dan mengawasi serta mengendalikan karyawan untuk tujuan keberhasilan koperasi.

c. Pengawas

Adalah orang yang dipilih dan diangkat oleh anggota PKP-RI yang ditetapkan melalui rapat anggota sebagai wakil anggota untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap tata kehidupan PKP-RI. Tugas dari pengawas antara lain :

- Mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pengurus.
- Memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi

sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan.

- Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat melalui pengurus koperasi.
- Memeriksa dan meneliti neraca akhir tahun dan perhitungan hasil usaha.
- Membuat laporan tahunan secara tertulis.

d. Kepala Kantor

Adalah alat kelengkapan organisasi yang mempunyai wewenang/tanggung jawab memelihara kantor, adapun tugasnya antara lain :

- Melakukan kegiatan operasional tata usaha yang meliputi surat menyurat, kebutuhan alat-alat kantor serta perlengkapannya dan menyimpan, mengarsip semua dokumen perusahaan.
- Menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh pengurus.
- Memimpin, memerintah serta mengontrol bagian-bagian yang ada dibawahnya.
- Bertanggungjawab terhadap pengurus atas kelancaran segala proses kegiatan operasional PKP-RI.

e. Unit Pertokoan

Suatu unit yang terdiri dari karyawan yang mengurus usaha pertokoan, adapun tugasnya yaitu bertanggungjawab atas transaksi barang dagangan.

f. Unit Simpan Pinjam

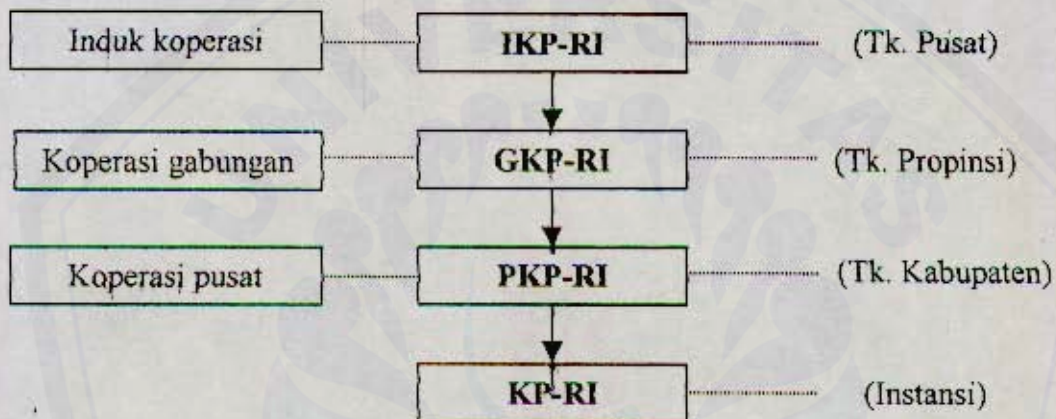
Unit usaha koperasi yang terdiri dari karyawan yang berwenang menangani masalah simpan pinjam keuangan.

g. Unit Penyaluran Beras

Unit usaha koperasi yang bertugas dalam penyaluran beras dari Dolog kepada anggota-anggotanya.

2.3.2 Struktur Eksternal Organisasi

Atas komitmen bersama, koperasi mempunyai struktur organisasi eksternal yang merupakan satu kesatuan. Sesuai pasal 6 UU perkoperasian No.25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi gabungan dan pusat adalah bentuk dari koperasi sekunder.



2.4 Bidang Organisasi

2.4.1 Keputusan Rapat Anggota

Dalam tahun 1999 telah dilaksanakan rapat anggota sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan tanggal 10 April 1999 dan Rapat Anggota Rencana Kerja membahas tentang Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) diselenggarakan pada tanggal 20 Nopember 1999. Dari kedua jenis rapat anggota tersebut telah dapat diputuskan hal-hal yang mendukung perkembangan PKP-RI, baik yang berkaitan dengan bidang usaha dan organisasi.

2.4.2 Kepengurusan

a. Kegiatan

Tidak berbeda dengan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, untuk mencapai produktivitas kerja, pengurus bekerja sesuai dengan *job discription* yang telah ditentukan. Namun demikian jika pengurus merasa perlu ada sebagian tugas yang dimintakan bantuan tenaga dari pihak pengawas, misalnya dalam rangka menghadiri rapat anggota yang pada suatu saat/suatu hari terdapat/terjadi beberapa kegiatan/rapat anggota.

Disamping mengadakan kegiatan pembinaan kepada anggota, pengurus juga selalu mengadakan koordinasi dengan pejabat dalam hal ini Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dalam upaya lebih memantapkan sistem kerja maupun perkembangan PKP-RI beserta anggota-anggotanya (KP-RI).

b. Susunan Pengurus

Susunan pengurus PKP-RI periode 1996-1999 dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 1. Susunan Pengurus PKP-RI Periode 1996-1999

No	N a m a	Jabatan	Penataran Perkoperasian
1	Mubini, BA	Ketua I	Pernah
2	Drs. Sadiran B.K.	Ketua II	Pernah
3	Drs. S Widjanarko	Sekretaris I	Pernah
4	Ir. Sudiro D.A.	Sekretaris II	Pernah
5	Wurgiyati Iskak	Bendahara I	Pernah
6	Suki Hadi Prajitno	Bendahara II	Pernah
7	Drs. Djoko Rahardjo	Pleno	Pernah

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 1999.

Untuk penghematan biaya dan karena dirasa cukup, maka pengurus hariannya 2 (dua) orang yaitu saudara ketua I dan bendahara I. Semua pekerjaan dilaksanakan atas dasar kerjasama yang baik antara pengurus, pengawas, kepala kantor dan karyawan.

c. Rapat Pengurus

Untuk melaksanakan kegiatan serta menentukan kebijaksanaan langkah organisasi, pengurus selalu membahas melalui rapat pengurus baik secara rutin maupun secara insidental.

Tahun 1999 telah diadakan rapat pengurus sebanyak 15 kali dengan rincian sebagai berikut :

- rapat pengurus rutin : 12 kali
- rapat insidental : 3 kali

Perlu kami kemukakan bahwa selain rapat-rapat intern, pengurus juga selalu menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh gerakan koperasi lain yang diadakan oleh Kandepkop Pengusaha Kecil dan Menengah.

d. Pengawas

Susunan pengawas PKP-RI adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Susunan Pengawas PKP-RI Periode 1996-1999

No	N a m a	Masa Jabatan	Penataran Perkoperasian
1	Agus Suparman	1 Tahun	Pernah
2	Y. Mudjiharno, SH	2 Tahun	Pernah
3	Slamet Adi Warsito	3 Tahun	Pernah

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 1999

Yang habis masa bhaktinya adalah saudara Agus Suparman, wafat Juni 1999.

Untuk pembagian tugas dalam operasional koperasi, dapat disampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Y. Mudjiharno, SH sebagai koordinator melaksanakan pemeriksaan bidang keuangan.
2. Slamet Adi Warsito melaksanakan pemeriksaan dibidang administrasi organisasi dan usaha.

Dalam tahun 1999, pengawas sesuai dengan kewajiban serta pembagian tugasnya telah mengadakan pemeriksaan di bidang

organisasi, usaha dan keuangan. Pemeriksaan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu tiap tri (tiga) bulan dan pada akhir tahun buku, yang bersifat rutin. Disamping itu juga dapat dilaksanakan secara insidental sesuai keperluan.

e. Karyawan

Jumlah karyawan sampai dengan akhir tahun 1999 sebanyak 15 (lima belas) orang yang dipimpin oleh seorang kepala kantor. Disamping karyawan tetap juga terdapat karyawan tidak tetap sebagai petugas pem bagian beras sebanyak 2 (dua) orang.

Daftar nama-nama karyawan tetap, yang masih aktif adalah sebagai berikut :

PKP-RI :

1. Kepala kantor	: V. Soeharto
2. Pembukuan	: Aniek Ermala Chordiasuti
3. Kasir :	Arofiah
4. Persediaan	: Wiwik Kusdariati
5. Agendaris	: Pratiwi Citraswati
6. Komputer	: Hari Setyowinarno
7. Penjualan	: Suranto Utomo
8. Pengemudi	: Suprayitno
9. Pesuruh	: Wakiyun
10. Jaga malam	: Madi

Unit Simpan Pinjam :

1. Kasir :	Ifaningsih
2. Pembukuan/Beras	: Suprayitno
3. Perkreditan	: Mugiono
4. Pembukuan	: Endang Prasetyaning R.
5. Jaga malam	: Sugimin

Gaji terendah sebesar Rp. 47.500,00 per bulan dan gaji tertinggi sebesar Rp. 140.000,00 per bulan. Selain itu hal-hal yang berhubungan

dengan kesejahteraan karyawan telah dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Memberikan bantuan biaya pengobatan
- b. Memberikan kesempatan dan fasilitas untuk rekreasi
- c. Memberikan seragam karyawan/seragam kerja 1 stel tiap tahun
- d. Memberikan tunjangan beras 10 kg untuk setiap karyawan
- e. Memberikan gratifikasi sebanyak 3 (tiga) kali gaji setiap tahun
- f. Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)

Guna meningkatkan pengetahuan telah dilaksanakan rapat-rapat lain yaitu :

Tabel 3. Jenis Rapat Yang Telah Dilaksanakan PKP-RI Tahun 1999

No.	Jenis Rapat	Frekwensi	Ket.
1	RAT, RARK GKP-RI dan Bukop Majapahit	3 kali	
2	Rapat bersama gerakan koperasi di Ngawi	4 kali	
3	Rapat dengan instansi/dinas yang terkait	3 kali	

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 1999.

f. Keanggotaan

Jumlah anggota sampai dengan akhir tahun 1999, anggota PKP-RI masih berjumlah 68 Primer/KP-RI.

- 1). Perkembangan anggota 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Perkembangan Anggota Selama 3 Tahun Terakhir

Th	Awal Tahun	Tambah	Kurang	Jumlah	Ket.
1997	68	-	-	68	
1998	68	-	-	68	
1999	68	-	-	68	

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 1999.

2). Perkembangan simpanan anggota adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Perkembangan Simpanan Anggota Tahun 1999

(dalam rupiah)

No.	Uraian	1997	1998	1999
1	Simp. Pokok	1.240.000	1.340.000	1.660.000
2	Simp. Wajib	98.036.285	110.425.285	122.541.885
3	Simp. Lain-lain	37.092.100	40.120.705	42.557.805

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 1999.

Perlu kami kemukakan bahwa dalam memenuhi kewajiban simpanan wajib, masih ada beberapa anggota yang setorannya belum aktif (tertib) sehingga pengurus berupaya memberikan motivasi kepada anggota, bahkan melaksanakan tagihan.

3). Guna meningkatkan peran PKP-RI terhadap anggotanya serta dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, PKP-RI memberikan dorongan/motivasi dengan memberikan bantuan finansil, materi dan tenaga penyaji, agar KP-RI - KP-RI mampu melaksanakan penataran sendiri kepada semua anggotanya atau sebagian/perwakilan, tergantung kepada jumlah anggota.

2.5 Administrasi

Proses administrasi sangat diperlukan di dalam suatu usaha/kegiatan, hal ini dimaksudkan agar langkah-langkah yang akan dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi oleh Sugandha (1989:10) administrasi adalah :

seluruh proses organisasi dalam penentuan sasaran dan pencapaiannya dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien melalui dan bersama-sama dengan orang lain secara terkoordinasikan dengan menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, eksekusi, pengorganisasian, persuasi, kepemimpinan dan penilaian.

2.5.1 Administrasi Organisasi.

Sesuai dengan petunjuk administrasi, maka pengadaan maupun pengerjaannya telah dilaksanakan seoptimal mungkin sehingga segala kegiatan organisasi telah direkam/dicatat menurut kebutuhan dan kepentingan. Jumlah buku organisasi keseluruhan berjumlah 17 (tujuh belas) buah.

2.5.2 Administrasi Keuangan

Pelaksanaan administrasi keuangan telah menggunakan sistem akuntansi koperasi, demikian pula mengenai sistem laporan keuangannya. Bukti-bukti transaksi penjualan, pembelian maupun transaksi hutang piutang dibendel dan disimpan sedemikian rupa sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan mudah untuk mencarinya.

2.6 Permodalan dan Usaha

2.6.1 Permodalan

Dalam meningkatkan usaha dan pelayanan kepada anggota/KP-RI, permodalan merupakan meruakan faktor penting. Disamping permodalan dari dalam PKP-RI, jika dipandang perlu diusahakan modal dari luar atau pihak ketiga yang tidak memberatkan dan diperkirakan masih menghasilkan keuntungan. Untuk tahun 1999 usaha penambahan modal luar berasal dari Bukop Majapahit utamanya untuk menghadapi hari raya Idul Fitri pada bulan Januari 1999.

Adapun posisi permodalan khususnya modal sendiri dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 6. Perkembangan Modal Sendiri Tahun 1997,1998 dan 1999

(dalam rupiah)

No.	Jenis	1997	1998	1999
1	Simp. Pokok Anggota	1.240.000	1.340.000	1.660.000
2	Simp. Wajib Anggota	98.036.285	110.425.285	122.541.885
3	Cadangan Koperasi	75.040.272	81.125.800	89.646.275
4	Cad. Pengemb. Usaha	43.442.275	46.420.785	48.328.370
5	Cad Pemb. Fisik	157.060.694	174.347.614	212.407.344
6	Modal Donasi	500.000	500.000	12.736.600
7	SHU sebelum pajak	21.912.163	30.378.616	39.444.344
Jumlah		397.231689	444.538.109	526.764.808

Sumber : Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 1999

Ada catatan penting yang perlu diperhatikan, bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib tidak bisa mencapai target yang diharapkan karena ada beberapa anggota PKP-RI yang belum melakukan pembayaran, sehingga perlu diadakan penagihan-penagihan.

2.6.2 Usaha

Jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh PKP-RI ini meliputi kegiatan, antara lain :

a. Unit Simpan Pinjam.

Usaha ini dilaksanakan dengan bekerja sama yang melibatkan Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKP-RI) Jawa Timur, dimana kerjasama yang telah dibina ini telah berjalan cukup lama. Keuntungan dari kerjasama ini diperoleh pada setiap tahun dan telah dicantumkan dalam perhitungan Rugi/Laba Neraca PKP-RI.

b. Unit Penyaluran Barang.

Perkembangan usaha pada unit penyaluran barang tahun 1999 relatif stabil jika dibandingkan dengan tahun 1998, SHU-nya mengalami sedikit kenaikan dari jasa penyertaan, sedangkan dari pendapatan penyaluran beras menurun.

Tabel 7. Perkembangan Omzet Usaha Tahun 1997, 1998 dan 1999
(dalam rupiah)

Tahun	Omzet	Laba Kotor	Keterangan
1997	138.654.825	23.523.313	
1998	402.443.000	24.619.079	
1999	398.158.150	33.759.690	

Sumber : Laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 1999.

c. Sejak tahun 1989 PKP-RI mengembangkan usaha lain dengan alternatif pada unit transportasi. Unit diupayakan dalam rangka pelayanan anggota sebagai difersifikasi usaha serta memanfaatkan peluang, dimungkinkan hasil usaha berupa pendapatan. Sejak tahun 1998 lebih digunakan sebagai penunjang operasional organisasi, sehingga diharapkan mampu menunjang eksistensi organisasi. Unit ini dari segi sosial telah banyak berjasa kepada anggota yang membutuhkan. Demikian juga pada perorangan/umum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

4.1.1 Ratio Likuiditas

Dari perhitungan rasio likuiditas jumlah yang diperoleh dari kedua kebijaksanaan adalah sama dan berada pada batas standar normal, untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut :

a. Current Rasio

Dari hasil perhitungan yang dilakukan, menurut Depkop = 2,41 dan menurut Standar Akuntansi Indonesia = 2,43, sehingga dari keduanya menyatakan PKP-RI mampu menutup hutang lancarnya dengan aktiva lancar yang dimiliki. Apabila dievaluasi dari standar normal (2,50) maka besar kedua rasio diatas hampir mendekati maka dapat dinyatakan baik.

b. Quick Rasio

Berdasarkan hasil perhitungan, menurut Depkop = 1,93 dan menurut Standar Akuntansi Indonesia = 1,95, sehingga dari hasil tersebut dapat dinyatakan PKP-RI mampu menutup hutang lancarnya dengan menggunakan quick asset/kekayaan yang dapat dengan segera dicairkan. Batas ukuran normal dari rasio ini adalah 1,00 maka kedua perhitungan besar rasio tersebut dianggap baik.

c. Cash Rasio

Baik menurut Depkop maupun Standar Akuntansi Indonesia jumlahnya sama yaitu 0,50, hal ini berarti PKP-RI tidak mampu menjamin/menutup hutang lancarnya dengan menggunakan kekayaan dari kas dan bank. Tetapi ditinjau dari batas kewajaran (0,71) maka besar rasio tersebut dianggap memadai/baik.

4.1.2 Rasio Solvabilitas

Didalam penentuan hasil rasio solvabilitas terdapat perbedaan cara perhitungan dari kedua kebijaksanaan tersebut, namun demikian hasil

perhitungan baik menurut Depkop maupun menurut Standar Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa PKP-RI mampu menutup seluruh hutangnya baik dengan modal sendiri maupun dengan seluruh aktiva.

a. Total Debt to Equity Ratio

Besar ratio dari analisis menurut Depkop = 3,23 atau setiap Rp.1,00 hutang dijamin dengan Rp.3,23 modal sendiri. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Indonesia = 32,34 % atau setiap Rp.1,00 modal sendiri menjamin Rp.0,32 total hutang.

b. Total Debt to Total Capital Assets Ratio

Besar rasio dari analisis menurut Depkop = 4,27 atau setiap Rp.1,00 seluruh hutang dijamin dengan Rp.4,27 total aktiva. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Indonesia = 24,44 % atau setiap Rp.1,00 total aktiva menjamin Rp.0,24 total hutang.

Selain itu kedua-duanya juga dianggap baik apabila dievaluasi dari batas normal besar solvabilitas dengan perincian sebagai berikut : dari perhitungan menurut Depkop besar rasio diatas 1,00 berarti dalam keadaan baik. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Indonesia, karena penggunaan rumus yang berbanding terbalik terhadap aturan Depkop, maka besar rasio dibawah 1,00 dianggap baik.

4.1.3 Rentabilitas

Pada perhitungan Rentabilitas terjadi perbedaan yaitu besar rentabilitas dari analisis menurut Depkop = 7,49 %, sedangkan menurut Standar Akuntansi Indonesia = 4,55 %. Meskipun demikian besar rentabilitas dari kedua kebijaksanaan dianggap baik apabila disesuaikan dengan standar normal sebesar 3,02.

4.2 Saran

Perhitungan rentabilitas sebaiknya dipertimbangkan lagi yaitu menggunakan SHU/keuntungan bersih dalam perhitungannya, agar prosentase keuntungan yang diperoleh benar-benar mencerminkan hasil usaha dari koperasi sendiri.



- _____. 1997. *Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Indonesia*. Semarang : Rineka Cipta
- _____. 1999. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PKP-RI Kab. Ngawi*. Ngawi : PKP-RI.
- _____. 1999. *Laporan Pertanggungjawaban Pengawas PKP-RI Kab. Ngawi*. Ngawi : PKP-RI.
- Amidipradja, R.H.T. dan R.A. Rivai Wirasasmita. 1990. *Neraca Koperasi*. Bandung : Pionir Jaya
- Edilius dan Sudarsono. 1994. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka cipta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 1999. Buku Satu. *Standard Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat
- Munawir, S. 1999. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Liberty
- Syamsuddin, L. 1995. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada
- Tim Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember
- Wirasasmita, R.A.R. dan Ani Kenangasari 1990. *Analisa Laporan Keuangan Koperasi*. Bandung: Pionir Jaya
- Wijaya, H.H. dan R.A. Rivai Wirasasmita. 1989. *Koperasi dan Akuntansi (Pendekatan Teoritis)*. Bandung : Pionir Jaya
- Sugandha, D. 1989. *Administrasi = strategi, taktik dan penciptaan efisiensi*. Jakarta : cv. Intermedia
- Sukamdiyo, Ign. 1997. *Manajemen Koperasi Pasca UU No.25 Tahun 1992*. Jakarta : Erlangga
- Soetardjo. 1989. *Studi Mengenai Kemajuan Koperasi Pegawai Negeri Di Daerah Tingkat 1 Jawa Timur*. Surabaya : Disertasi Unair.
- Riyanto, B. 1995. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Widiyanti, N dan Y.W. Sunindhia. 1998. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kamp, Di. 1996. *Penilaian Yang Sukses Dalam Sepekan*. Jakarta : Kesaint Blanc.

	1998	1999	1998
AKTIVA LANCAR			
1 Kas	70,304,475	5,249,450	13,650
2 Tabungan di Bank	1,209,741	1,960,878	50,000
3 Deposito	10,000,000	100,000,000	60
4 Piutang barang	179,843,230	95,843,905	9,535
5 Piutang jaringan usaha Koperasi	54,211,000	46,328,000	4,544
6 Persediaan barang	78,734,951	98,498,397	4,621
	394,303,397	347,880,630	6,578
AKTIVA LAIN-LAIN			
7 Pajak dibayar dimuka	1,948,399	1,686,776	2,284
PENYERTAAN			
8 Simpanan di GKP - RI/BUKOP	49,955,963	40,877,781	6,360
9 SKPB	3,230,000	3,230,000	
10 Partisipasi modal Unit - unit	180,040,000	132,540,000	
	233,225,963	176,647,781	
AKTIVA TETAP			
11 Tanah	2,876,400	2,876,400	81,125
12 Bangunan	61,716,416	65,866,416	46,420
13 Peralatan	3,891,527	5,419,450	174,347
14 Kendaraan	8,886,800	5,419,450	30,378
	68,484,344	74,162,267	444,538
Jumlah	697,962,103	600,377,454	600,377,454



Ketua I
Drs. S WIDJANAR KO

Pengurus PKP - RI Kabupaten Ngawi
Sekretaris I
Drs. S WIDJANAR KO

Bendahara I
Drs. DOKO RAHARD

Ketua II

Sekretaris II

Bendahara II

Drs. SADIRAN BK

Ir. SUDIRO DA

SUKI HANIPRAJITNO

Ngawi, 31 Desember 1999

Pengurus PKP - RI Kabupaten Ngawi

Perhitungan Rugi/Laba PKP-RI Kabupaten Ngawi
pada tanggal 31 Desember 1999

URAIAN		Th. 1999	Th. 1998
A. Pendapatan			
1	Penjualan barang	398,158,150	
	Harga pokok penjualan	364,398,460	
2	Pendapatan bunga dari anggota	12,649,000	10,967,000
3	Pendapatan biaya administrasi	1,347,500	890,020
4	Pendapatan penyaluran beras :		
	– Penerimaan	56,424,395	
	– Pengeluaran	55,152,670	
5	Pendapatan jasa penyertaan	50,631,100	43,651,680
	Jumlah pendapatan	99,659,015	82,113,454
B. Beban			
1	Beban organisasi dan pembinaan	21,927,600	15,795,750
2	Beban operasional	10,172,400	9,054,378
3	Beban administrasi dan umum	35,117,403	31,864,409
4	Beban penyusutan	5,572,923	5,624,473
	Jumlah beban	72,790,326	62,339,010
	SHU sebelum pendapatan lain--lain (kena pajak)	26,868,689	19,774,444
C. Pendapatan lain-lain (tidak kena pajak)			
1	Pendapatan bunga Bank/deposito	8,380,913	7,633,894
2	Pendapatan SHU dari GKPRI/BUKOP/SKPB	4,194,732	2,970,278
	Sisa hasil usaha sebelum pajak	39,444,334	30,378,616
	PPh. Pasal 25 Badan (Pajak terutang) :		
	10% x 25,000,000 =	2,500,000	
	15% x 1,868,689 =	280,303	
	Sisa hasil usaha setelah pajak	36,664,031	28,401,171

Digital Repository Universitas Jember

Daftar kekurangan Simpanan pokok dan Wajib per 31 Des. 1999

NO	Nama K P R I	Simp. Pokok	Simp. Wajib	Jumlah	Keterangan
1	K P P D	-	150.000	150.000	1 bl.
2	Bahagia	-	110.400	110.400	8 bl.
3	K P P D K	-	74.400	74.400	1 th.
4	Perhutani	-	654.400	654.400	8 bl.
5	Kopenda	-	220.000	220.000	6 bl.
6	KP. Ngale	-	50.400	50.400	1 th.
7	P e n a	-	78.000	78.000	1 th.
8	D e p p e n	-	134.400	134.400	lunas Jan. 20
9	S M P Jogorogo	20.000	111.200	131.200	4 th.
10	Bina Marga	-	86.400	86.400	1 th.
11	A m a l	-	235.200	235.200	lun. Peb. 20
12	Utama SMP 4	-	57.600	57.600	lun. Jan. 20
13	K o p a	-	80.000	80.000	2 th.
14	G a t r a	-	35.700.	35.700	7 bl.
15	Bangkit	-	103.200	103.200	1 th.
16	Tirta Usaha	20.000	26.400.	46.400	1 th.
17	Bhineka Manunggal	-	45.600	45.600	lun. Peb. 20
18	Baradha	-	43.200	43.200	1 th.
19	Merpati	-	184.800	184.800	1 th.
	J u m l a h	40.000	2.481.300	2.521.300	

SHU sebelum pajak	Rp 39.444.334,-
Pajak terutang :	<u>" 2.780.303,-</u>
Sisa Hasil Usaha setelah pajak :	<u><u>Rp 36.664.031,-</u></u>

Pembagian menurut Anggaran Dasar PKP-RI Kabupaten Ngawi pasal 31 :

30% Cadangan	Rp 10.999.231,-
20% Simpanan	" 7.332.800,-
25% Pembelian oleh anggota	" 9.166.000,-
10% Dana Pengurus	" 3.666.400,-
5% Dana Karyawan	" 1.833.200,-
5% Dana Pendidikan Koperasi	" 1.833.200,-
5% Dana Sosial	<u>" 1.833.200,-</u>
J U M L A H :	<u><u>Rp 36.664.031,-</u></u>

Lampiran 5 Penjelasan Neraca PKP-RI Kabupaten Ngawi

Tanggal 31 Desember 1999

1. Kas

Saldo awal th. 1999	Rp. 5.249.450,00	
Penerimaan	<u>Rp. 815.903.655,00</u>	Rp. 821.153.105,00
Pengeluaran	<u>Rp. 750.848.630,00</u>	
Saldo	Rp. 70.304.475,00	

2. Tabungan di bank

Saldo awal th. 1999	Rp. 1.960.878,00	
Setoran	<u>Rp. 74.367.950,00</u>	Rp. 76.357.950,00
Penerimaan bunga deposito/tabungan bank	<u>Rp. 85.880.913,00</u>	Rp. 85.209.741,00
Penarikan	<u>Rp. 84.000.000,00</u>	
Saldo	Rp. 1.209.741,00 *)	
*) Tapius BNI	Rp. 312.430,00	
Tahapan Lippo	Rp. 342.185,00	
Britania BRI	<u>Rp. 555.126,00</u>	
	Rp. 1.209.741,00	

3. Deposito

Saldo awal	Rp. 100.000.000,00
Penarikan	<u>Rp. 90.000.000,00</u>
Saldo akhir	Rp. 10.000.000,00

4. Piutang barang

Saldo awal	Rp. 95.843.905,00	
Piutang tahun 1999	<u>Rp. 378.344.300,00</u>	Rp. 474.188.205,00
Penerimaan angsuran	<u>Rp. 294.344.925,00</u>	
Saldo akhir	Rp. 179.843.230,00	

5. Piutang usaha koperasi

Saldo awal	Rp. 46.328.000,00	
Piutang th. 1999	<u>Rp. 97.500.000,00</u>	Rp. 43.828.000,00
Penerimaan angsuran	<u>Rp. 89.617.000,00</u>	
Saldo akhir	Rp. 54.211.000,00	

6. <u>Persediaan barang</u>		
Persediaan awal	Rp. 98.498.397,00	
Pembelian tahun 1999	Rp. 344.691.257,00	
Potongan penjualan	Rp. <u>99.000,00</u>	Rp. 443.288.654,00
Harga pokok penjualan	Rp. 364.398.460,00	
Potongan pembelian	Rp. <u>155.243,00</u>	Rp. 364.553.703,00
Persediaan akhir th. 1999		Rp. 78.734.951,00
7. <u>Pajak dibayar dimuka</u>		
PPh. Pasal 25, tahun 1999 yang telah dibayar		Rp. 1.948.399,00
8. <u>Simpanan di GKP-RI/Bukop</u>		
Saldo awal	Rp. 40.877.781,00	
Pembayaran setoran	Rp. <u>9.078.182,00</u>	Rp. 49.955.963,00
Rincian :		
a. Simpanan pokok di GKP-RI	Rp. 750.000,00	
Simpanan pokok di Bukop	Rp. 3.000.000,00	
b. Simpanan wajib di GKP-RI	Rp. 22.402.730,00	
Simpanan wajib di Bukop	Rp. 8.055.000,00	
Simpanan Wajib Pinjam di Bukop	Rp. 3.787.500,00	
Simpanan sukarela di Bukop	Rp. 4.865.889,00	
c. Simpanan khusus di GKP-RI	Rp. 665.977,00	
Simpanan khusus di Bukop	Rp. <u>6.423.867,00</u>	
		Rp. 49.955.963,00
9. <u>SKPB</u>		
Simpanan Khusus Pemilikan Bank (SKPB) masih seperti tahun yang lalu		Rp. 3.230.000,00
10. <u>Partisipasi modal unit-unit</u>		
Saldo tahun yang lalu	Rp. 132.540.000,00	
Tambahan tahun 1999	Rp. <u>47.500.000,00</u>	Rp. 180.040.000,00
Rincian :		
a. Pada Unit Simpan Pinjam GKP-RI Jatim	Rp. 1.000.000,00	
b. Pada unit wajar GKP-RI	Rp. 500.000,00	
c. Pada usaha minyak GKP-RI	Rp. 40.000,00	
d. Pada unit bangunan	Rp. <u>178.500.000,00</u>	
		Rp. 180.040.000,00
11. <u>Tanah HGB</u>		
Tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 330m ² dengan harga perolehan		Rp. 2.876.400,00

12. Bangunan

Bangunan toko dan kantor dengan harga perolehan		Rp. 83.166.416,00
Akumulasi :		
Peny. bangunan th. yg lalu	Rp. 17.300.000,00	
Peny. bangunan th. 1999	<u>Rp. 4.150.000,00</u>	<u>Rp. 21.450.000,00</u>
Harga buku		Rp. 61.716.416,00

13. Peralatan

Nilai peralt. th. lalu	Rp. 17.310.133,00	
Dijual 3 drum kosong	<u>Rp. 105.000,00</u>	Rp. 17.205.133,00
Akumulasi :		
Peny. peralt. th. yang lalu	Rp. 11.890.683,00	
Peny. peralt. th. 1999	Rp. 1.422.923,00	<u>Rp. 13.313.606,00</u>
Harga buku		Rp. 3.891.527,00

14. Kendaraan

Mobil Toyota HI-ACE Nopol. AE. 1403 N		
Harga perolehan		Rp. 8.886.800,00
Akum. PH Kendaraan sampai dengan th. yang lalu		<u>Rp. 8.886.799,00</u>
Harga buku		Rp. 1,00

15. Hutang pada bukan anggota

Saldo tahun yang lalu	Rp. 13.650.000,00	
Hutang dalam tahun 1999	<u>Rp. 139.119.500,00</u>	Rp. 152.769.500,00
Pembayaran		<u>Rp. 134.160.500,00</u>
Saldo hutang		Rp. 18.609.000,00

16. Hutang bank

Saldo hutang th. yang lalu	Rp. 50.000.000,00	
Hutang dalam tahun 1999	<u>Rp. 50.000.000,00</u>	Rp. 100.000.000,00
Pembayaran		<u>Rp. 50.000.000,00</u>
Saldo hutang		Rp. 50.000.000,00

17. PPh. Pasal 21

Saldo/belum disetor th. lalu	Rp. 60.000,00	
Pernot. PPh. Psl. 21. th. 1999	<u>Rp. 886.000,00</u>	Rp. 964.000,00
Telah disetor		<u>Rp. 880.000,00</u>
Saldo belum disetor		Rp. 66.000,00

18. Biaya yang masih haru di bayar

Kekurangan biaya angkut beras tahun 1999	Rp.	1.080.000,00
Persediaan biaya RAT tutup tahun 1999	Rp.	6.050.000,00
Biaya listrik, telepon, air bulan Desember 1999	Rp.	208.700,00
Biaya study banding tahun 1999	Rp.	2.500.000,00
Biaya study banding th.1998 yang belum digunakan	Rp.	<u>2.000.000,00</u>
	Rp.	11.838.700,00

19. Dana kesejahteraan karyawan

Merupakan dana yang diambil tiap tahun dari SHU setelah pajak sebesar 5%.

Saldo tahun yang lalu	Rp.	4.544.710,00	
Dari SHU tahun 1998	Rp.	<u>1.420.000,00</u>	Rp. 5.964.770,00
Pengeluaran			Rp. <u>860.000,00</u>
Saldo			Rp. 5.104.770,00

20. Dana pendidikan koperasi

Saldo tahun yang lalu	Rp.	4.621.395,00	
Dari SHU tahun 1998	Rp.	<u>1.420.060,00</u>	Rp. 6.041.455,00

21. Dana sosial

Saldo tahun yang lalu	Rp.	6.578.925,00	
Dari SHU tahun 1998	Rp.	<u>1.040.060,00</u>	Rp. 7.998.985,00
Pengeluaran untuk urusan-urusan sosial			Rp. <u>1.456.000,00</u>
Saldo akhir tahun			Rp. 6.542.985,00

22. Dana hari tua

Merupakan dana yang disisihkan tiap tahun dari SHU tahun silam sebesar 2%

Saldo tahun yang lalu	Rp.	2.248.500,00
2% x Rp.20.285.037,00 (SHU th. 1997 setelah pajak)		
	Rp.	<u>405.700,00</u>
	Rp.	2.690.200,00

23. Simpanan lain-lain anggota

Simpanan lain-lain sebagian besar merupakan akumulasi simpanan KP-RI yang berasal dari pembagian SHU tahun-tahun yang lalu, yang dimaksudkan untuk mendukung (partisipasi) pembangunan gedung PKP-RI, dan sebagian lainnya merupakan jasa anggota yang belum/tidak diambil oleh KP-RI yang bersangkutan.

Saldo tahun yang lalu	Rp.	40.120.705,00	
Bagi jasa angg. th. 1998	Rp.	<u>11.560.750,00</u>	Rp. 51.681.455,00
Jasa anggota yang diambil			Rp. <u>9.123.650,00</u>
Saldo simpanan lain-lain			Rp. 42.557.805,00

24. Simpanan beras anggota

Merupakan simpanan yang dibayar oleh Pegawai negeri penerima beras sebesar Rp1,00/Kg.

Saldo tahun yang lalu	Rp. 18.083.840,00	
Penerimaan tahun 1999	Rp. 4.427.980,00	Rp. 22.511.820,00
Diambil oleh anggota		Rp. 2.625.440,00
Saldo		Rp. 19.886.380,00

25. Dana Asuransi

Dana asuransi gedung atas resiko sendiri :

Saldo tahun yang lalu	Rp. 6.360.000,00	
Tambahan menurut R/PPB	Rp. 1.000.000,00	
Dari bunga bank	Rp. 500.000,00	Rp. 7.860.000,00

26. Simpanan pokok anggota

Simpanan pokok yang semula sebesar Rp.5000,00 menurut anggaran dasar yang baru ditetapkan menjadi Rp.25.000,00 tiap anggota.

Saldo tahun yang lalu	Rp. 1.340.000,00	
Penerimaan tahun 1999	Rp. 320.000,00	Rp. 1.660.000,00

27. Simpanan wajib anggota

Simpanan wajib ditetapkan sebesar Rp.100,00 tiap anggota perorangan KP-RI

Saldo tahun yang lalu	Rp.110.425.285,00	
Penerimaan tahun 1999	Rp. 12.116.600,00	Rp. 122.541.885,00

28. Modal donasi

Dari hadiah pemenang lomba FKP-RI se-Jatim tahun 1992 sebesar

Rp. 500.000,00

Dari dana pendidikan Bukop Majapahit Rp. 1000.000,00

Dari partisipasi anggota (KP-RI) dalam rangka pembangunan gedung FKP-RI

Rp. 11.236.600,00

Rp. 12.736.600,00

29. Cadangan koperasi

Diambil tiap tahun dari SHU setelah pajak sebesar 30% ✓

Saldo tahun yang lalu Rp. 81.125.809,00

Dari SHU tahun 1998 Rp. 8.520.466,00 Rp. 89.646.275,00

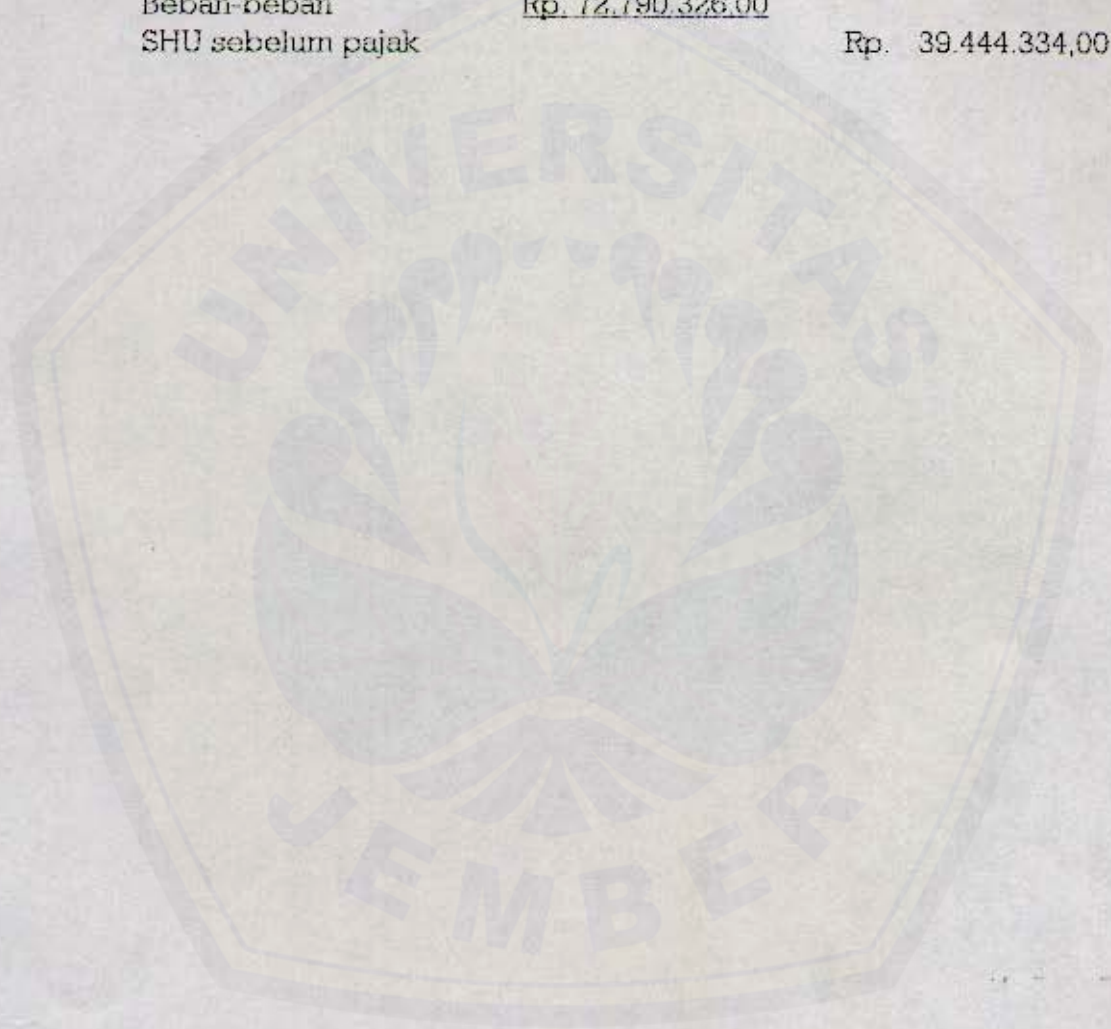
30. Cadangan pengembangan usaha

Akumulasi sampai dengan tahun yang lalu ✓ Rp. 46.420.785,00

Penerimaan dari penyaluran beras Rp. 1.907.585,00

Rp. 48.328.370,00

31. <u>Cadangan pembangunan fisik</u> ✓		
Akumulasi sampai dengan tahun yang lalu		Rp. 174.347.614,00
Penerimaan dari penyaluran beras		<u>Rp. 38.059.730,00</u>
		Rp. 212.407.344,00
32. <u>Sisa Hasil Usaha</u>		
Jumlah penerimaan	Rp. 112.234.660,00	
Beban-beban	<u>Rp. 72.790.326,00</u>	
SHU sebelum pajak		Rp. 39.444.334,00





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Veteran No. 3 Telp. (0331) 422723 Fax. (0331) 425540 JEMBER (68118)

Nomor : 57/ J25. 3 . 1 / PL.5 / 2000
Lampiran : -
Perihal : Permohonan ijin mengadakan Penelitian

02 JUN 2000

Kepada : Yth, Sdr. Pimpinan
Pusat Koperasi Pegawai RI Ngawi
di -
NGAWI.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

Nama / NIM / Jurusan : YUSANDY NARISKA / E1D195-2245 / Adm Niaga
Desen / Mahasiswa : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Alamat : Jl. Sumatra V / 80 Jember.
Judul Penelitian : Penilaian Neraca Akhir Periode Untuk Mengetahui
Posisi Keuangan Pada Pusat Koperasi Pegawai
Republik Indonesia Kabupaten Ngawi.
Di Daerah : Kab. Ngawi
Lama Penelitian : 1 (satu) Bulan

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Saudara untuk memberikan ijin kepada dosen/mahasiswa tersebut dalam mengadakan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Ketua,
Sekretaris

Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistawo
NIP. 131 792 232

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Universitas Jember
2. Dosen /Mahasiswa ybs

PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP-R)
KABUPATEN NGAWI

BADAN HUKUM NO. 707C / BH / II / 12 - '67 TANGGAL : 22 NOPEMBER 1995

Alamat : Jalan Trunojoyo 80c Ngawi Telepon No. 749054

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 1 /PKPRI-8/B.4/2000

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yusandy Nariska
NIM : E1D1 95-2245
Jurusan : Administrasi Niaga
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Judul Penelitian : Penelitian Neraca Akhir Periode untuk Mengetahui Posisi
Keuangan Pada Pusat Koperasi pegawai Republik Indonesia
Kabupaten Ngawi
Dosen pembimbing : Drs.Matnur Haryono
Drs.Rudy Eko Pramono, Msi.
Mahasiswa tersebut diatas telah mengadakan Penelitian pada Koperasi kami
selama : 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 7 Juni 2000 s/d 1 Juli 2000,
dengan baik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ngawi, 3 Juli 2000

Ketua

Pusat Koperasi Pegawai-RI
Kabupaten Ngawi

